



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT DAN DIRJEN PERHUBUNGAN
UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 31 Januari 2023
Waktu : Pukul 10.25 s.d. 13.35 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Roberth Row (F-P. NASDEM) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022
2. Membahas Program Kerja Tahun 2023
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
43 dari 56 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
11 dari 12 orang Anggota
 1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
 2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 3. Mochamad Herviano
 4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
 5. Sukur H. Nababan, S.T.
 6. Ir. Sudjadi
 7. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
 8. Sri Rahayu
 9. Ir. Effendi Sianipar
 10. Harvey B. Malaihollo
 11. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. Cen Sui Lan
 4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.

5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
6. Ilham Pangestu
7. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
5 dari 7 orang Anggota
 1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Ir. Sumail Abdullah
 3. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 5. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Soehartono, M.Si.
 3. Sri Wahyuni
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
4 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
 4. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 3. KH. Toriq Hidayat, Lc.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
5 dari 5 orang Anggota
 1. H.A. Bakri H. M., S.E.
 2. Athari Ghauthi Ardi
 3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 4. H. Boyman Harun, S.H.
 5. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI (Ir. Arif Toha Tjahjagama, DEA)
2. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI (Maria Kristi Endah Murni, S.H., M.H.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V,
Yang Terhormat Saudara Dirjen Perhubungan Laut, dan
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan beserta seluruh
jajarannya, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, hari Selasa, 31 Januari 2023.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat wal'afiat, baik secara fisik maupun secara virtual.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat, Daftar Hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani oleh 28 Anggota, 10 fisik, 18 orang secara virtual dari 56 Anggota Komisi V DPR RI dan terdiri dari lebih dari separuh fraksi, unsur fraksi yang hadir, maka telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagai ketentuan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka rapat dengar pendapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI pada hari ini, kami buka dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.25 WIB)

Kami ucapkan terima kasih kepada Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara dan yang telah hadir secara fisik serta turut menghadirkan secara virtual Kepala Otoritas Kepelabuhan; Kepala Distrik Navigasi; Kepala KSOP; Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 dan Kelas 2 seluruh Indonesia; Kepala Otoritas Bandara Udara; dan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 dan Kelas 2. Khusus seluruh Indonesia dalam rapat dengar pendapat pada hari ini.

Para Dirjen dan Anggota Komisi V DPR RI yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 yang lalu, Komisi V DPR RI telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan dan sebagai tindak lanjut hari ini dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan sesuai surat undangan pada agenda rapat hari ini adalah “Evaluasi APBN Tahun 2022 dan Membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2023 untuk masing-masing Unit Eselon I, Kementerian Perhubungan”.

Untuk agenda pertama, terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, Komisi V DPR RI ingin mendapat penjelasan dari Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengenai bagaimana hasil akhir pencapaian realisasi anggaran masing-masing Unit Eselon I pada tahun 2022 sesuai saran dan masukan yang telah diberikan oleh Komisi V DPR RI pada rapat-rapat sebelumnya.

Adapun terkait dengan agenda kedua yaitu pembahasan Program Kerja Tahun Anggaran 2023, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pagu anggaran Dirjen Perhubungan Laut sebesar 8,7 triliun dan Dirjen Perhubungan Udara sebesar 7,1 triliun, dengan anggaran yang ada ini kami perlu mendapat penjelasan terkait perbedaan anggaran Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara berdasarkan hasil keputusan rapat tanggal 8 September 2022. Selanjutnya, kami ingin mengetahui penggunaan dan pemanfaatan dari anggaran tersebut untuk mencapai program atau kegiatan prioritas nasional pada masing-masing Unit Eselon I Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Strategi optimalisasi daya serap anggaran untuk program strategis nasional pada Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara berdasarkan RPJMN 2020-2024 Kementerian Perhubungan yang perlu mendapat penjelasan;
2. Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara agar tetap menjaga kebutuhan standar pelayanan untuk menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengaturan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pada pelayanan maupun penerbangan, pada pelayanan maupun penerbangan;
3. Subsidi angkutan laut perintis jika dikoneksikan dengan subsidi-subsidi transportasi lainnya seperti: subsidi tol laut; subsidi angkutan udara perintis; dan subsidi perintis angkutan barang di darat, seberapa besar

dampak subsidi ini terhadap perekonomian di daerah, misalnya soal disparitas harga dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan penjelasannya secara singkat, sehingga kita dapat, kita bisa lebih fokus saat pendalaman. Untuk itu kami persilakan saudara Dirjen Perhubungan Laut dulu. Silakan.

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):

Bismillahirrahmanirrahiim,

**Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi V DPR RI,
Yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Ketua Komisi V DPR RI,
Yang kami hormati Bapak-Ibu para Anggota Komisi V DPR RI, serta
Para Hadirin sekalian yang kami muliakan,**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua,

Pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, yang dengan berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali dalam acara Rapat Dengar Pendapat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Pimpinan beserta Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat terkait dengan pembahasan "Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Program Kerja Tahun Anggaran 2023".

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan para Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi V DPR RI yang selalu mendukung Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku mitra kerja dan perwakilan dari pemerintah untuk terus melakukan upaya perbaikan.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen,

Mic-nya didekatin sedikit, apa Pak Dirjen belum makan kurang keras?

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):

Oh.

KETUA RAPAT:

Coba yang keras sedikit Pak Dirjen. ya.

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. ARIF TOHA TJAHHAGAMA, DEA):

Siap Bapak.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan para Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi V DPR RI yang selalu mendukung Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku mitra kerja dan perwakilan dari pemerintah untuk terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia selaku pengguna jasa transportasi.

Pada pelaksanaan Program Tahun 2022, dapat kami sampaikan Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp9,03 triliun atau sebesar 97,38% dari Pagu sebesar Rp9,28 triliun. Dapat kami sampaikan bahwa Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 di atas, Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar 96,3%. Selanjutnya terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2022, dapat kami sampaikan realisasi PNBPNP sebesar 4,62 triliun atau 127,88% dari target PNBPNP Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3,8 triliun.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan tugas untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan prioritas yaitu:

1. Pembentukan *rute* pelayaran yang saling terhubung tercapai 100% dari target 27% realisasi 27%;
2. Yang kedua, pengembangan pelabuhan utama yang memenuhi standar dengan capaian sesuai target tahun 2022 sebanyak 4 pelabuhan utama yang memenuhi standar yaitu: Pelabuhan Tanjung Priok; Tanjung Perak; Makassar New Port; dan Pelabuhan Belawan;
3. Yang ketiga, pelaksanaan subsidi angkutan tol laut dengan capaian sebesar 143% dari target 23 trayek dengan realisasi sebanyak 33 trayek.

Terkait pelaksanaan program padat karya, Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2022 dapat kami sampaikan realisasi anggaran sebesar Rp1,38 triliun atau sebesar 98,96%; Realisasi penyerapan tenaga kerja orang sebanyak 26.665 orang atau sebesar 140,56%; realisasi penyerapan tenaga kerja orang hari sebesar 124.813 orang hari atau sebesar 100,95%; realisasi upah sebesar Rp18,44 miliar atau sebesar 109,92% melebihi dari target.

Terkait Laporan Capaian Kinerja Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2022, Dirjen Perhubungan Laut memiliki empat Sasaran Program (SP) dengan delapan Indikator Kinerja Program yakni:

1. Indikator program pertama yaitu rasio konektivitas transportasi laut nasional dengan capaian 101%;
2. IKP-2 berupa persentasi pencapaian trayek pelayaran yang membentuk lup secara teratur dengan capaian 100%;
3. IKP-3 persentasi *on time performance* pada pelabuhan utama dan pengumpul dengan capaian 120,48%;
4. IKP-4 dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi laut dengan capaian 109,17%; serta
5. IKP-6 tingkat keadaan kenavigasian dengan capaian 98,55%.

Pada Tahun Anggaran 2022 nilai akuntabilitas Ditjen Perhubungan Laut sebesar 80,42% dengan Kategori A, lebih besar dibandingkan tahun 2021 sebesar 75,92 dengan Kategori BB. Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022 sebesar 34,07 lebih besar dibandingkan tahun 2021 sebesar 33,66%.

Capaian terhadap dukungan program atau Kegiatan Strategis Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2022 dikategorikan menjadi empat bidang yang terdiri dari:

1. Kegiatan pembangunan pengembangan rehabilitasi kualitas pelabuhan meliputi: pembangunan pelabuhan baru di 2 lokasi senilai Rp89,49 miliar; pengembangan fasilitas pelabuhan di 13 lokasi senilai Rp361,39 miliar; penyelesaian fasilitas pelabuhan di 5 lokasi senilai Rp63,11 miliar; *replacement* fasilitas pelabuhan di 3 lokasi senilai Rp110,24 miliar; dan rehabilitasi pelabuhan di 17 lokasi senilai Rp430,92 miliar.
2. Kegiatan perkapalan dan kepelautan meliputi: pengadaan perangkat sistem informasi *e-SID* senilai Rp8,13 miliar; pengadaan *Portable Sulfur Fuel Oil Analyzer* senilai Rp2,8 miliar; pengembangan aplikasi E-Pas Kecil senilai Rp3,7 miliar.
3. Kegiatan keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi: pembangunan Kapal Patroli Kelas 3 sejumlah 2 unit senilai Rp56,44 miliar; pembangunan Kapal Patroli Kelas 4 sejumlah 8 unit senilai Rp55,18 miliar; pembangunan Kapal Patroli Kelas 5 sejumlah 10 unit senilai Rp30,6 miliar; dan armada dan pangkalan, penataan alur dan perlintasan, perambuan dan perbengkelan serta telekomunikasi pelayaran senilai Rp172 miliar.
4. Untuk kegiatan pelayanan dan subsidi perintis. Perintis angkutan laut sejumlah 117 trayek senilai Rp1,197 triliun; kapal ternak sejumlah 6 trayek senilai Rp63,32 miliar; tol laut sejumlah 33 trayek senilai Rp435 miliar; Kapal Rede sejumlah 16 trayek dengan layanan senilai Rp35 miliar.
5. Selanjutnya, kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau PSO bidang angkutan laut sejumlah 26 kapal milik PT Pelni dan dan 26 trayek dengan Pagu sebesar Rp2,33 triliun.

Untuk dukungan Ditjen Perhubungan Laut terhadap Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2022 yaitu:

1. Palu, rehabilitasi dan rekonstruksi Pelabuhan Wani, Donggala dan Pantoloan yang merupakan proyek MYC 2019-2023 senilai 100 miliar;
2. KEK Likupang untuk pembangunan pelabuhan Likupang senilai Rp25 miliar;
3. Pembangunan kapal Bottom Glass senilai Rp6,11 miliar; dan
4. KEK Tanjung Kelayang untuk rehab Pelabuhan Tanjung Batu senilai Rp26,12 miliar;
5. Selanjutnya dukungan Ditjen Perhubungan Laut terhadap dukungan pariwisata prioritas dan super prioritas di antaranya pembangunan 2 unit Kapal Bottom Glass di Likupang dan Labuan Bajo dengan total nilai sebesar Rp12,21 miliar;
6. Selanjutnya pembangunan Pelabuhan Sanur senilai Rp376 miliar;
7. Pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Likupang senilai Rp19,7 miliar, serta
8. Pembangunan Pelabuhan Wanci senilai Rp68 miliar.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami muliakan,

Untuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Perwujudan angkutan laut yang murah, mudah, simpel dan kompetitif;
2. Peningkatan konektivitas transportasi laut;
3. Penyediaan infrastruktur pelabuhan laut yang berdaya saing;
4. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, keamanan, dan perlindungan maritim;
5. Peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut; serta
6. Peningkatan integrasi dalam pengelolaan organisasi.

Sesuai dengan RKP Nasional Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan delapan arah kebijakan antara lain:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan desain *job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar; serta
7. Pembangunan Ibu Kota Negara.

Untuk tahun 2023 rincian kronologi Pagu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai berikut: Pagu kebutuhan sebesar Rp13,4 triliun; Pagu indikatif sebesar Rp8,8 triliun; Pagu anggaran sebesar Rp8,7 triliun; dan Pagu alokasi sebesar Rp8,5 triliun yang terdiri dari program dukungan manajemen senilai Rp3,1 triliun, serta program infrastruktur konektivitas senilai Rp5,4 triliun. Dengan rincian berdasarkan sumber dana Tahun Anggaran 2023 terdiri dari rupiah murni sebesar Rp4,8 triliun atau setara 57%; dari PNBPN sebesar Rp2,3 triliun atau setara 27%; dari SBSN sebesar 1 triliun atau setara

12%; Badan Layanan Umum sebesar 7,7 miliar atau setara 4%; serta pinjaman luar negeri sebesar 333 miliar atau setara 0,09%.

Selanjutnya, alokasi per bidang pada Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1,720 triliun;
2. Bidang kepelabuhanan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2,209 triliun;
3. Bidang kenavigasian dengan Pagu sebesar Rp614 miliar;
4. Bidang KPLP dengan Pagu sebesar Rp427 miliar.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen, mohon maaf, tadi Bapak masuk pas di sini yang tadi saya pertanyakan soal selisih, selisih dari keputusan kita tanggal 8 September itu 8,7 jadi 8,5, ini kan selisihnya ada hampir 4, apa berapa triliun, ini 2 triliunan.

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):

Iya.

KETUA RAPAT:

Coba, coba Bapak jelaskan ke kita perbedaan itu mengapa. Di mana ininya?

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):

Ya perbedaan ini adanya beberapa revisi daripada kegiatan Bapak, jadi tidak dapat dilaksanakan sehingga ada perubahan porsi anggaran tersebut Pak, nanti.

KETUA RAPAT:

Iya, artinya bahwa harus juga kita memutuskan di sini karena ini yang sudah kita mutuskan kan, anggaran yang Bapak kelola ini kan harus bersama dengan DPR untuk memutuskan itu. Jadi, harus dilaporkan lagi supaya kita harus sepakat *gitu* bersama kita dari 8,7 yang kita sudah putuskan ya itu sekarang itu 8 September ya, 2022 waktu itu kita putuskan. *Nah*, sekarang menjadi 8,5 itu yang itu yang akan dijalankan 2023 nanti kan?

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):

Ya.

KETUA RAPAT:

Ya.

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):

Ya Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi saya kira itu ya, Pak Ketua ya, agar yang kita putuskan di dewan ini itu tidak berubah-ubah *gitu*, nanti hasil yang *nggak* ada data di kita Komisi V bahwa anggarannya 8,7 *gitu*, itu yang kita putuskan di sini, padahal yang Bapak jalankan sekarang 8,5 ya kan. Jadi, ini catatan kita harusnya ya. Silakan, Pak.

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):

Baik, sambil kami siapkan jawaban Bapak, nanti kami teruskan dulu paparan, nanti kami berikan penjelasan.

1. Untuk bidang KPLP dengan Pagu sebesar Rp427 miliar;
2. Bidang perkapalan dan kepelautan dengan Pagu sebesar Rp95 miliar; dan
3. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar Rp3,518 triliun.

Dukungan Program atau Kegiatan Strategis Ditjen Hubla Tahun Anggaran 2023, yaitu sebagai berikut:

Kegiatan pembangunan pengembangan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan meliputi: pembangunan Pelabuhan Patimban senilai Rp133 miliar; rehabilitasi dan rekonstruksi Pelabuhan Wani, Donggala dan Pantoloan senilai Rp100 miliar; pengembangan fasilitas pelabuhan di 21 lokasi senilai Rp861,6 miliar; penyelesaian fasilitas pelabuhan di 5 lokasi senilai Rp268,6 miliar; *replacement* fasilitas pelabuhan di 2 lokasi senilai Rp129,9 miliar; rehabilitasi fasilitas pelabuhan di 13 lokasi senilai Rp430,92 miliar.

Untuk kegiatan perkapalan dan kepelautan: pengadaan perangkat sistem informasi e-SID senilai Rp9 miliar; pengembangan perangkat sistem informasi perkapalan dan kepelautan senilai Rp10,4 miliar; pengembangan aplikasi e-Pas kecil senilai Rp4,3 miliar.

Kegiatan keselamatan dan keamanan pelayaran: pembangunan Kapal Patroli Kelas 3 sejumlah 2 unit senilai Rp11,5 miliar; pembangunan Kapal Patroli Kelas 4 sejumlah 8 unit senilai Rp64,45 miliar; pembangunan penanggulangan pencemaran Terminal Marine Pollution senilai Rp54,03 miliar; armada dan bangkalan, penataan alur dan perlintasan, perambuan dan perbengkelan serta Telkompel senilai Rp304,35 miliar.

Untuk kegiatan pelayanan dan subsidi perintis: perintis laut sejumlah 117 trayek senilai Rp926,41 miliar; kapal ternak sejumlah 6 trayek senilai Rp63,43 miliar; tol laut sejumlah 35 trayek senilai Rp435,81 miliar; Kapal Rede sejumlah 16 layanan senilai Rp44 miliar.

Untuk kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau PSO bidang Angkutan Laut sejumlah 26 kapal PT Pelni dan 26 trayek dengan Pagu sebesar Rp2,39 triliun.

Untuk *automatic adjustment* Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 dari Pagu APBN rupiah murni sebesar Rp4,89 triliun terdapat total *automatic adjustment* sebesar 374 miliar dengan rincian: belanja pegawai sebesar Rp66 miliar; belanja barang sebesar Rp180 miliar; dan belanja modal sebesar Rp128 miliar.

Realisasi Anggaran Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 dengan posisi per Januari 2023 yakni sebesar Rp244 miliar atau sebesar 2,84% dari Pagu sebesar Rp8,58 triliun. Selanjutnya, terkait penerimaan PNPB Tahun 2023 dapat kami sampaikan ditargetkan mencapai Rp4,4 triliun.

Berikut, kami sampaikan rekapitulasi kegiatan kontraktual Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023. Dari seluruh kegiatan yang sudah dilakukan proses pelelangan sebanyak 10,36% serta kegiatan yang sudah kontrak sebanyak 26,73% per Januari 2023.

Terkait pelaksanaan program padat karya. Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut: target penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.043 orang; target penyerapan tenaga kerja orang hari sebesar 65.029 orang hari; target upah sebesar Rp13,36 miliar; serta target penyerapan anggaran sebesar Rp986,7 miliar.

Berikut, kami sampaikan sebaran kegiatan penyelenggaraan angkutan laut untuk kegiatan perintis, tol laut, dan angkutan ternak Tahun Anggaran 2023. Dari total 33 provinsi, terdapat 42 pangkalan perintis yang melayani hingga total 117 trayek.

Selanjutnya adalah peta sebaran kegiatan strategis pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut. Selanjutnya adalah peta sebaran dukungan pembangunan infrastruktur keselamatan dan keamanan pelayaran Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut. Selanjutnya adalah peta sebaran dukungan pembangunan infrastruktur keselamatan dan keamanan pelayaran Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut, dan berikutnya adalah peta sebaran dukungan pariwisata prioritas dan super prioritas dukungan terhadap pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi dan dukungan perhubungan di perbatasan.

**Bapak-Bapak Pimpinan,
Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Demikian, paparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat dengar pendapat terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Program Kerja Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya guna optimalisasi penyelenggaraan dan pelayanan transportasi laut ke depan, kami selaku unsur pemerintah dan penyelenggara transportasi laut mengharapkan dukungan dan masukan dari para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat guna upaya perbaikan dan peningkatan kinerja transportasi laut di masa yang akan datang. Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Dirjen Perhubungan Laut.

Saya beri kesempatan kepada Dirjen Perhubungan Udara. Singkat-singkat saja, Bu, silakan.

**DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(MARIA KRISTI ENDAH MURNI, S.H., M.H.):**

Terima kasih.

**Yang kami hormati, Bapak Ketua Komisi V,
Bapak-bapak Wakil Ketua,
Ibu dan Bapak Anggota Komisi V DPR RI, dan
Hadirin sekalian yang kami muliakan,**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di sini pada acara Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama kami Dirjen Perhubungan Udara dan jajaran.

Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, serta Program Kerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023. Bersama saya, turut hadir para direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara serta diikuti pula secara virtual oleh para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Kepala Kantor UPBU Kelas 1, di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

Pada kesempatan ini pokok-pokok materi yang akan kami sampaikan adalah Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022 dan Program Kerja Tahun 2023.

**Bapak Ketua, Bapak para Wakil Ketua, Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR
yang kami hormati,**

Pertama, izinkan kami sampaikan Evaluasi Pelaksanaan APBN Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2022. Pagu awal Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2022 adalah sebesar 7,04 triliun dan mengalami revisi anggaran hingga jumlah Pagu akhir yaitu 7,51 triliun. Pada tahun 2022, DIPA Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Perhubungan Udara semula adalah 7,03 triliun menjadi 7,51 triliun, di mana dalam perkembangannya mengalami penambahan dan pengurangan, di antaranya: kebijakan AA (*Automatic Adjustment*) tahap 1 dan 2; penambahan anggaran untuk kegiatan revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma; penggunaan saldo awal BLU Balai Kalibrasi dan UPBU Gorontalo; penambahan Pagu PHLN; realokasi anggaran blokir AA ke BA-BUN.

Slide berikut, realisasi anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2022 per tanggal 30 Januari sebesar 7,3 triliun atau sebesar 97,29% dari Pagu sebesar 7,5 triliun. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan prognosa akhir tahun 2022 serta persentasi realisasi anggaran pada tahun 2021.

Dalam kesempatan ini pula, izinkan kami menyampaikan target dan realisasi PNPB tahun 2022. Realisasi per tanggal 31 Desember adalah 1,45 triliun atau 109,86% dari target PNPB sebesar 1,32 triliun. Realisasi penggunaan anggaran bersumber pada dana PNPB sebesar 56...656 miliar atau 98,05% dari alokasi MP (*Major Project*) tahap 2 tahun 2022 sebesar 669 miliar.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Ibu-Bapak Komisi V yang kami hormati,

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program padat karya, Ditjen Perhubungan Udara pada tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan pendukung program padat karya yang tersebar pada 147 desa atau kabupaten di 29 provinsi dengan nilai penyerapan tenaga kerja sebanyak 11.478 orang dengan nilai upah sebesar 15,66 miliar.

Slide berikut, dari aspek komposisi sumber dana anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2022, Pagu anggaran Ditjen Perhubungan Udara tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 525,38 miliar atau kurang lebih 8%. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan Pagu Anggaran pada beberapa sumber dana yaitu: rupiah murni berkurang 614 miliar; PHLN berkurang 157 miliar; PNPB 55 miliar; dan BLU 22 miliar.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR yang kami hormati,

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan poin bahasan terkait program kerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2023. Fokus dan sasaran program Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut: Penyelesaian kontrak tahun jamak dan *tunggakan* pekerjaan; pelayanan masyarakat dalam program jembatan udara; program keselamatan dan keamanan penerbangan; program padat karya; dan dukungan konektivitas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan program nasional.

Pada tahun ini Ditjen Perhubungan Udara memiliki program kerja terkait dengan: program konektivitas dan jembatan udara; program keselamatan penerbangan; program bandar udara baru; pengembangan bandar udara perbatasan terisolir dan rawan bencana; penunjang kawasan prioritas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus dan kawasan industry. Rincian mengenai program tersebut adalah terpapar pada *slide* berikut, *slide* 12. Pada tahun 2023, sebaran pelayanan angkutan udara perintis yang diselenggarakan pada 21 Korwil serta 220 *rute* perintis penumpang, 40 *rute* perintis kargo, dan 1 *rute* udara kargo.

Slide berikut bahan ditayangkan adalah sebaran rencana pelayanan angkutan udara perintis penumpang dan kargo atau jembatan udara tahun 2023.

Kemudian kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Udara tahun 2023 tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada bahan yang ditayangkan di wilayah Sumatera terdapat delapan provinsi: Sumatera Utara; Riau; Aceh; Jambi; Kepulauan Riau; Sumatera Selatan; Bengkulu; dan Lampung. *Next* untuk wilayah Jawa dan Nusa Tenggara ada 4 provinsi. Kemudian untuk Kalimantan ada 4 provinsi. Untuk Sulawesi tersebar di 6 provinsi. Untuk di Papua dan Maluku ada 4 provinsi: Maluku; Maluku Utara; Papua; dan Papua Barat.

Selama tahun 2023 terdapat 19 proyek prioritas yang direncanakan untuk dapat diresmikan Bapak Presiden pada kegiatan pembangunan bandar udara baru maupun bandar udara *existing*, penyelesaian terminal, daftar lengkap prioritas tersebut pada paparan berikut ini 19 bandara.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR yang sangat kami muliakan,

Dalam rangka mendukung program pemerintah guna memulihkan perekonomian nasional, Ditjen Perhubungan Udara menargetkan pelaksanaan kegiatan pendukung program padat karya yang tersebar pada 146 desa atau kabupaten di 34 provinsi dengan jumlah tenaga kerja 6.195 dan upah yang dibayarkan sebesar 13,8 miliar. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Pada *slide* berikut kami laporkan posisi sampai dengan 30 Januari 2023 realisasi anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 sebesar 189,51 miliar atau 2,71 dari Pagu 6,99 triliun berdasarkan data SPAN Kementerian Keuangan. Angka ini lebih besar dari prognosa bulan Januari 2023 yaitu 2,24%.

Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua, Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR yang kami muliakan,

Ditjen Perhubungan Udara memiliki 253 paket strategis dengan Pagu di atas 500 juta termasuk *multiyears contract* SBSN, PHLN dan perintis. Posisi sampai dengan 30 Januari 2003 sudah diajukan lelang sebanyak 153 kegiatan dari 253 paket strategis tersebut di antaranya 92 paket sudah kontrak dan 41 paket masih proses lelang.

Slide berikutnya, kami sampaikan target PNBP dan BLU Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil Panja DPR tanggal 22 September 2022, target PNBP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 disetujui dengan penambahan 1 triliun, sehingga penambahan target PNBP Ditjen Perhubungan Udara sebesar 137 miliar dari semula 1,115...155 triliun menjadi 1,292 triliun dengan Pagu yang dapat digunakan sebesar 917 miliar.

Bapak Ketua, Bapak Para Wakil Ketua, Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, besar harapan kami masukan serta dukungan Ibu-Bapak sekalian demi tercapainya pelayanan jasa transportasi udara yang aman, selamat, dan nyaman kepada seluruh pengguna transportasi di Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Ya, Bu Dirjen, 8 September kan kita putus itu 7,1 ya? 7,1 ya, paparan Ibu itu menjadi 6,9 ya, berarti ada selisih 185 miliar ya? Berarti turun ya, ada *oke* baik. Ya ini supaya *clear* jangan sampai kita nanti masih pegang berpatokan kepada 7,1.

Baik, demikianlah penjelasan yang telah disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan melakukan pendalaman. Sesuai sebelum saya ke anggota, Pak Ketua, Pak Lasarus akan memberikan tanggapan. Silakan, Pak Lasarus.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) - KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik, mohon izin dulu Teman-teman sekalian.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Dirjen Laut, Dirjen Udara yang saya hormati beserta seluruh jajarannya,**

Ini di luar konteks hari ini maka saya minta waktu. Pertama ke Bu Dirjen Udara, ini terkait dengan Sriwijaya, Bu. Tempo hari waktu ada menteri rapat kita semua mendengar komen saya soal pembayaran santunan kepada korban kecelakaan Sriwijaya beberapa waktu JT berapa itu dulu Bu ya? JT eh *sorry sorry* SJ-182, ya? SJ-182. *Nah*, kami sudah didatangi berkali-kali dari pihak korban Bu, ya, dengan alasan dipersulit ini bahasa mereka dipersulit pembayaran seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu.

Kemudian, saya mencoba mencari sebabnya apa, seperti yang saya sampaikan di Raker dahulu bahwa sebabnya karena perusahaan asuransi mewajibkan mereka menandatangani surat pernyataan yang mengharuskan mereka tidak boleh menuntut kalau nanti setelah dibayar pihak mana pun. *Nah*, keluarga korban ini *nggak* mau, tidak ada titik temu.

Saya coba mencari jejak di aturan yang ada, di aturan yang ada tidak pernah mensyaratkan bahwa wajib melampirkan surat pernyataan tidak boleh menuntut pihak mana pun baru santunan itu dibayar, ini kan tidak ada titik temu ini. Saya coba cari aturan kenapa itu bisa jadi syarat, *nah*, kemudian waktu dulu kita rapat khusus dengan membahas kecelakaan Sriwijaya 182 ini, ya, dulu kita sudah sampaikan apakah Sriwijaya mensyaratkan aturan yang sama seperti Lion terdahulu yang mewajibkan semua juga harus menandatangani itu. Ternyata Sriwijaya waktu itu bilang tidak, rupanya sama aturannya Bu ya. Setelah kita telusuri lagi Sriwijaya *ngomong* langsung ke saya bahwa yang mensyaratkan itu adalah asuransi.

Nah, di sini titik persoalannya ini, Sriwijaya ada menjawab *omongan* saya lewat media karena ini media banyak menanggapi pembicaraan saya ini menyangkut hak orang, ya, dan Sriwijaya agak sedikit apa ya membantah pembicaraan saya *gitu loh*, tapi nanti tidak apa-apa Bu akan saya tunggu Sriwijaya pada saat kita Raker nanti terkait dengan Nataru, saya minta Sriwijaya nanti dihadirkan dan akan kita selesaikan pada saat waktu itu nanti sehingga kita tidak perlu rapat khusus membahas soal ini.

Mohon izin Bu Dirjen, kalau bisa sampaikan kepada kami apa sebetulnya permasalahan ini? Memang adakah aturan yang mewajibkan itu ya, sehingga asuransi baru boleh membayar dan itu dibenarkan oleh negara atau ada atau tidak ada aturan itu? Kalau tidak ada, pertanyaannya kenapa sampai sekarang hak mereka ini tidak diselesaikan?

Jadi, kami saya sebetulnya tempo hari mengharapkan pak menteri menjawab pembicaraan saya, tapi waktu rapat terdahulu pak menteri tidak menjawab ya dan sekarang saya minta barangkali nanti Bu Dirjen Udara bisa di kesempatan pertama sampaikan kami dulu soal ini karena keluarga korban ini Bu dari Kalimantan Barat yang banyak, Dapil saya, sudah pasti seperti yang saya sampaikan mereka seringkali mengontak saya soal ini. Saya tentu tidak merasa terganggu karena memang adalah kewajiban bagi kita juga sebagai Anggota DPR menyampaikan aspirasi masyarakat apa lagi yang menyangkut soal hal yang seperti ini.

Mohon izin, barangkali Pimpinan Pak Roberth, sebelum kita pendalaman yang lain, persoalan lama ini PR kita semua sebetulnya bisa dulu dijelaskan oleh Ibu Dirjen Perhubungan Udara sebetulnya apa masalah yang terjadi di sini Bu, atau kami belum menerima aturan yang disampaikan oleh pihak Sriwijaya yang mengharuskan tidak boleh menuntut pihak mana pun di pernyataan itu sehingga baru itu boleh dibayar. Sekian Pimpinan, saya mohon izin dulu barangkali untuk kita bisa dijawab pertanyaan yang ini.

Terima kasih, Pak Roberth Rouw.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Ketua.
Bu Dirjen bisa langsung merespon.

**DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(MARIA KRISTI ENDAH MURNI, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Bapak Ketua.

Untuk pertanyaan ini kami menerima surat dari, beberapa waktu yang lalu kami menerima surat dari pihak Sriwijaya dan memang menjelaskan ada beberapa saya lupa angkanya, Bapak Ketua, mohon izin, tapi memang ada beberapa korban yang belum dibayarkan dengan alasan korban-korban ini menuntut kepada Boeing langsung melalui pengacara yang mereka tunjuk sendiri, tapi tentu untuk ini kami akan dalam dan akan kami laporkan segera untuk kepada Bapak, kami memang harus jujur kami belum sempat memanggil Sriwijaya, Bapak, tapi dalam 1-2 hari ini kami akan mendalami dengan Sriwijaya karena ada isu yang Bapak sampaikan tadi.

Terima kasih, Bapak.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) - KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik, Bu Dirjen terima kasih.

Mungkin perlu disampaikan Bu, secara terbuka di sini apakah memang ada aturan dari pemerintah, ini kita aturan kan Sriwijaya harus tunduk kepada aturan main Bu, yang dibuat oleh Dirjen Perhubungan Udara dalam hal ini. Apakah di aturan tentang santunan itu dari Dirjen Perhubungan Udara ada mencantumkan aturan yang dimaksud oleh Sriwijaya. Manakala mereka sudah menuntut Boeing, tidak boleh dibayar dulu *gitu loh*. Jadi, menurut saya di sini ada *dispute* Bu kalau menurut ini harus diperjelas, harus ada embarkasi, harus ada pembatasan yang jelas *gitu loh*. Jangan disangkut pautkan hak menuntut masyarakat ini dengan kewajiban yang sudah ditegaskan oleh pemerintah.

Nah, urusan mereka menuntut tidak menuntut itu urusan hukum siapapun itu negara saya pikir tidak bisa membatasi itu, tapi urusan soal aturan ini dilaksanakan atau tidak, saya pikir ini kan urusan yang aturan ada sekarang. *Nah*, pertanyaan saya adakah diatur seperti sebagaimana dimaksud sehingga tuntutan ini, atau sehingga santunan ini belum dibayarkan sampai hari ini karena ada kaitan dengan yang dimaksud oleh pihak Sriwijaya.

Terima kasih, Pimpinan, ini perlu di-*clear*-kan dulu ini Pimpinan, supaya kita tidak perlu membahas itu lagi nanti di belakang hari.

KETUA RAPAT:

Iya, saya kira apa yang ditanyakan Pak Lasarus itu, ya menurut saya itu yang harus dijawab dan saya ingatkan bahwa hak masyarakat itu dengan

Sriwijaya harus dipisahkan dengan Boeing, karena ini asuransi ya, beda dia bukan...bukan pesawat bukan pabriknya yang asuransi tapi jiwanya diasuransi oleh perusahaan yang menjalankan itu. Jadi, ini harus dibedakan. Jadi, tidak menjadi syarat untuk rakyat punya hak menuntut kepada pabrik itu dihilangkan ya. Silakan, Bu.

**DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(MARIA KRISTI ENDAH MURNI, S.H., M.H.):**

Baik, Bapak, kami mohon waktu untuk mendalami, terima kasih.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) - KETUA KOMISI V DPR RI:

Barangkali itu saja Bu ,di ketentuan kita tidak ada kan aturan itu Bu, ya? atau ada di ketentuan? Yang saya baca tidak ada.

**DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(MARIA KRISTI ENDAH MURNI, S.H., M.H.):**

Seingat saya tidak ada.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) - KETUA KOMISI V DPR RI:

Tidak ada ya?

**DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(MARIA KRISTI ENDAH MURNI, S.H., M.H.):**

Oke, baik. Cukup Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, saya kira sudah jelas ya.

Baik, saya kembali ke Anggota untuk melakukan pertanyaan pendalaman. Yang pertama, dari Bu Sri Rahayu, saya persilakan.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Terima kasih, Pimpinan.

**Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati, dan
Pak Dirjen Laut dan Udara yang saya hormati dan seluruh jajaran,**

Saya tidak banyak bertanya, langsung saja yang pertama adalah untuk dua-duanya mungkin terkait dengan PNBK, Pak. Dalam rapat Banggar itu kan Perhubungan ini kan antara lain karena kenaikan dari pendapatan yang bukan pajak itu kan dinaikkan, artinya ini ada optimisme ke depan bahwa ini bisa diandalkan untuk...untuk membantu penerimaan dari APBN dan tentu hal-hal ini ada berbagai cara untuk mendapatkan hal tersebut dan saya hanya ingin

tanya, tahun 2023 ini dasar analisis dari Bapak apa dan Ibu? Sehingga, harapan terutama dari laut ya, Pak, ya dan dari udara juga demikian karena sekarang ini apa penumpang sudah mulai bagus begitu, tentu kalau dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 itu mungkin 2022 awal itu tentu jauh. *Nah*, sekarang ini pesawat mulai padat terus. *Nah*, saya mohon dasarnya.

Kemudian yang kedua, Pak, hubungan *eh* Pak Dirjen Laut, apa angkutan transportasi yang dari laut ini dalam...dalam pikiran saya, saya ini jarang-jarang mungkin bahkan hampir tidak pernah naik transportasi laut ya, dalam pikiran saya kan dulunya naik laut itu lama kan begitu ya Pak, ya, mungkin saya bisa diberikan gambaran sehingga bagaimana caranya supaya dengan adanya anggaran-anggaran yang Bapak tentukan untuk fasilitas, kemudian untuk *replacement* dan sebagainya itu dampaknya tentu harapannya adalah untuk bagaimana masyarakat tertarik untuk naik kapal laut tidak pesawat dan tidak yang lainnya. *Nah*, oleh karena itu saya ingin tahu juga dari Bapak penjelasan terkait dengan hal tersebut sejauh mana dampaknya di anggaran tahun 2023 ini terkait dengan PNPB juga dan tentu harapannya adalah ketertarikan dari masyarakat untuk naik angkutan laut begitu.

Kemudian dari Ibu Dirjen, saya melihat bahwa di dalam paparan Ibu di halaman 11 itu ada 220 *rute* perintis ya, bandara perintis ya. Kemudian di tahun 2023 juga ada pembangunan 7 bandara, artinya ini kan juga bertambah juga begitu untuk terkait dengan hal tersebut. Lalu bagaimana skema Ibu atau mungkin metode atau strategi supaya bandara perintis ini lama-lama tidak selalu akan membebani APBN karena bandara perintis kan mesti ada subsidiya. *Nah*, kira-kira strateginya seperti apa? Karena ini kan terkait juga dengan apa pesawatnya itu sendiri dan kalau kita perhatikan bahwa sekarang Garuda pun, pesawatnya juga tidak begitu banyak, sekarang tinggal 40-an ya itu sesuatu yang sangat mustahil kalau dibandingkan dengan jumlah 220 ditambah dengan yang baru di tahun 2023. Artinya Ibu juga harus mikir bekerja keras untuk hal-hal tersebut. Di satu sisi juga sekarang bandara-bandara kita yang kita bangun itu justru yang...yang yang banyak pesawatnya itu justru bukan dari kita begitu dari dari artinya dari pemerintah, tetapi justru dari swasta meskipun itu tidak ada masalah, artinya tidak tidak salah begitu. Lalu strategi yang akan Ibu lakukan apa terkait dengan tersebut? Di satu sisi juga untuk meringankan beban dari APBN supaya tidak terus mensubsidi bandara-bandara tersebut.

Saya mohon perhatian Ibu dari apa namanya landasan yang ada di Aceh yang di Kabupaten Singkil. Kabupaten Singkil itu kalau mau menuju Aceh itu harus lewat Medan karena lebih cepat. Kalau *nggak* salah lebih cepat berapa jam, 8 jam mungkin ya, kalau lewat situ dan kalau kita dari Lhokseumawe menuju sana itu bandara apanya landasannya itu Ibu perhatikan itu sepertinya *kok* aspalnya kayak berbagai karena saya pernah *landing* di situ di apa mau mencari landasan itu *kok* susah banget *gitu* ya, kayaknya karena kecil sekali dan jalannya kayak seperti jalan apa landasannya atau *runway*-nya itu perlu mendapatkan perhatian. Tolong itu juga diperhatikan.

Saya kira itu dari saya dan yang terakhir mungkin, Dapil saya ini kan tidak ada bandara Ibu, Dapil-nya Dapil saya juga laut juga *nggak* ada, Pak, ada

laut tetapi tidak ada pelabuhannya *gitu*. *Nah*, selama ini tentu saya tidak mendapatkan program yang terkait dengan padat karya. Lalu seperti apa langkahnya?

Terima kasih Ibu-Bapak, saya kembalikan kepada Pimpinan. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, baik. Setelah Bu Sri, Ibu Cen silakan. Siap-siap Pak Anwar.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan, Teman-teman Anggota,
Yang saya hormati dari Bu Dirjen, Pak Dirjen, dan seluruh jajaran,**

Pertama ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, saya bolak-balik ini pemaparan Bapak sedikit sekali program untuk Kepri, Dapil saya. Dapil saya itu Pak Dirjen kepulauan, jadi sebenarnya di Dapil saya itu sangat memerlukan pelabuhan laut. Saya lihat di peta sebaran kegiatan strategis tidak ada satupun. Jadi, pelabuhan-pelabuhan di tempat saya itu pada dasarnya sudah sangat tidak layak, contohnya di Tarempa Anambas. Jadi, tolong mungkin bisa dimasukkan sebagai kegiatan, juga kegiatan padat karya di seluruh KSOP ke depan mungkin bisa melibatkan saya sebagai Anggota DPR.

Yang kedua, saya melihat ada navigasi ya, terima kasih sudah ada bantuan anggaran untuk navigasi Tanjung Pinang. Itu untuk Pak Dirjen. Untuk Bu Dirjen, terima kasih program banyak di Dapil saya. Saya ingin menanyakan insiden Lion Air menabrak garbarata Bandara Mopah Merauke Papua pada tanggal 26 Januari dan itu sudah tersebar, akibatnya mungkin dari KNKT belum keluar tapi disebutkan akibat *human error*. Saya ingin menanyakan fungsi tugas Perhubungan Udara bagi penerbangan kita, apakah hanya memberikan izin tidak ada pengawasan atau bagaimana? Karena kita lihat begitu banyak insiden pesawat udara dan setelah begitu lama nanti penyelidikannya akhirnya dikeluarkan karena *human error*. Kalau insiden Lion Air menabrak garbarata ini terjadi di darat masih bisa ditoleransi, walaupun *zero* toleransi untuk keselamatan. Bagaimana kalau terjadi pada saat di udara? Harus kita antisipasi.

Kelihatannya, Kementerian Perhubungan Udara ini kurang bagaimana ya kurang...kurang *strong* atau seperti apa. Contohnya kasus yang Sriwijaya disampaikan kepada Ketua yang disampaikan Ketua, sampai saat ini sudah bertahun-tahun tidak selesai. Kasus tiket yang sudah kita sampaikan kenaikan tiketnya setiap tahun begitu tinggi tidak ada penyelesaian. Jadi, mohon penjelasan Bu Dirjen apa tugas fungsi Perhubungan Udara yang bisa dirasakan masyarakat? Masyarakat tidak merasakan adanya...adanya tolak ukur fungsi tersebut, *nah*, yang kita tahu itu fungsinya hanya memberikan izin kepada

penerbangan untuk jalan, setelah itu tidak ada yang kita tahu seperti apa kontrolnya.

Yang kita tahu fungsi Perhubungan Udara itu membangun *airport*, tapi setelah itu dikelola oleh pihak lain dan di-KPBU-kan, setelah itu kita tidak tahu apa-apa lagi, tidak tahu bagaimana fungsinya Perhubungan Udara di dalam itu, apakah hanya sebagai regulator dan tidak punya kewenangan apa-apa. Jadi, mohon dijelaskan kepada kita juga supaya agar masyarakat itu mengetahui bahwa ada...ada begini ada, ada tanggung jawab dari Perhubungan. Jadi, itu saja Bu Dirjen.

Terima kasih, Pimpinan, saya kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Bu Cen. Selanjutnya, Pak Anwar Hafid, silakan.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita sekalian,

Bapak-Bapak para Pimpinan dan Sahabat Komisi V yang saya muliakan, Pak Dirjen Perhubungan Laut dan Udara dan seluruh Staf yang saya hormati,

Yang pertama, saya ingin menanyakan Pak, di Paparan ini halaman 5 saya lihat pengembangan pelabuhan utama Pak Dirjen Perhubungan Laut Pak, target 7, tercapai 4 lokasi, ini mungkin perlu dijelaskan kenapa cuma 4 yang tercapai Pak? Sementara kita lihat bahwa kebutuhan sesungguhnya masyarakat Indonesia ini terkait dengan pelabuhan utama itu dalam rangka mendukung tol laut itu sangat-sangat banyak sebetulnya Pak, tapi ini tidak bisa, tidak bisa direalisasikan target 7 tapi realisasinya hanya 4, itu.

Nah, yang kedua, malah terbalik di pelaksanaan subsidi angkutan tol laut dari target 25, tercapai 33 *rute*. *Nah*, ini perlu dijelaskan juga. Kalau saya melihat menyimpulkan bahwa ternyata tol laut ini menjadi salah satu andalan kita sekarang karena begitu dinikmati sehingga dari target 25 kemudian kita mencapai sampai 33 *rute*, berarti ini sangat penting Pak, tol laut, dan untuk mendukung tol laut itu saya kira kehadiran pelabuhan utama itu sangat-sangat penting. Jadi, mohon diperhatikan ini Pak Dirjen karena khususnya kami di daerah kawasan Timur Indonesia yang kebanyakan pulau itu Pak, transportasi laut ini menjadi utama. Kami tidak punya kereta di kereta api di sana Pak. Kami hanya punya kereta laut. *Nah*, fasilitas utama kereta laut ini adalah pelabuhan. Jadi, kalau bisa Pak Dirjen ke depan ini setiap pulau-pulau yang ada di sana saya, dari awal saya usulkan tempo hari saya sudah sampaikan melalui Pak Sekjen tolong diperhatikan Pak, di setiap kabupaten Pak, kalau bisa daerah-daerah bagian Timur ini, setiap kabupaten itu harus tersedia pelabuhan fasilitas

ke pelabuhan utama itu, sehingga *insya Allah* ini akan menjadi salah satu pendukung utama suksesnya program tol laut. *Nah*, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Pak Dirjen, Ibu Dirjen Perhubungan Udara. Yang pertama berkaitan dengan beberapa bandara perintis ya, kita tahu persis bahwa sekarang ini janganakan bandara perintis, ada bandara-bandara yang cukup besar juga sekarang ini tidak maksimal, apa lagi bandara perintis, tapi kalau kita melihat Ibu Dirjen yang saya perhatikan di lapangan di negara kita ini, justru bandara-bandara perintis ini itu sangat mendesak dibutuhkan oleh masyarakat ketimbang bandara-bandara yang besar yang kita menggunakan uang negara yang cukup banyak tapi sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan, oleh belum mendesak, kalau tidak ada itu tidak mati rakyat kita ini, tapi kalau bandara-bandara perintis ini tidak ada, ini sangat mengganggu.

Ibu Dirjen, bayangkan kenapa angka kemiskinan kita di Indonesia ini masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah yang terluar, terkebelakang, termiskin itu kenapa? Salah satu penyebabnya itu karena fasilitas transportasi baik darat, laut, udara ini yang sangat minim di daerah-daerah tersebut, itu yang penyumbang angka kemiskinan paling tinggi sebenarnya.

Nah, oleh karena itu, saya berkali-kali dalam setiap rapat dengar pendapat ini mengusulkan supaya ada kebijakan negara supaya bandara-bandara perintis ini bagaimana dimaksimalkan difungsikan ya. Kalau perlu mungkin pembangunan bandara kita *stop* dulu, tapi bagaimana memfungsikan bandara perintis ini, ini yang perlu dipikirkan sebenarnya. Kita subsidi atau dengan cara apapun kerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga ini bisa membantu masyarakat kita yang ada di daerah-daerah yang sangat sulit sarana transportasi tersebut.

Nah, yang kedua, saya ingin juga sedikit Bu Dirjen untuk mengingatkan kita soal fungsi regulator dari kementerian, ya, Kementerian Perhubungan. Kita banyak sekali keluhan masyarakat. Kita berharap sesungguhnya bahwa kehadiran kita ini ingin setiap saat bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Anggaran yang besar yang kita gunakan ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kita kepada rakyat kita, kepada masyarakat, namun di mana-mana kita masih mendengar banyak keluhan. Contoh misalnya penumpang-penumpang yang biasa tidak terurus oleh maskapai, ada yang *delay* sampai berjam-jam, ada yang biasanya di bandara seakan-akan terlantar tidak diperhatikan. Seenaknya saja ini, di mana fungsi regulator kita sebetulnya? Apakah tidak ada sanksi yang tegas? Saya berharap ada sanksi yang tegas sebetulnya dari kementerian, Bu Dirjen kepada maskapai-maskapai yang nakal ini.

Kita memang membutuhkan pesawat, kita membutuhkan mereka, tapi kita juga harus memperhatikan, karena tujuan kita melayani ini, mengeluarkan anggaran negara ini untuk melayani rakyat kita. Kalau mereka dibiarkan terlantar seperti biasa di bandara, kita bisa lihat sampai 10 jam, pernah saya mengalami 10 jam Pak-Ibu, itu luar biasa kasihan tanpa ada biasanya pemberitahuan, kita tanya sana-sini, mereka semua lempar bola tidak jelas

siapa yang bertanggung jawab. *Nah*, ini kan bagian dari urusan kita sebetulnya. Ini bukan semata-mata kesalahan maskapai, tapi ini kita pasti rakyat akan bertanya pemerintah ada di mana ini kalau begini? Kenapa pemerintah tidak mengurus ini? Apakah negara ini sudah tidak ada pemerintah sehingga kita terlantar seperti ini? Jangan sampai masyarakat kita menganggap bahwa kita tidak ada, kita tidak bisa memberi pelayanan yang maksimal kepada mereka. *Nah*, ini sekedar saran saya, saran saya kepada Ibu Dirjen, supaya ini juga menjadi perhatian.

Kita sangat bangga hari ini kita punya banyak bandara yang baru, di mana-mana pembangunan bandara luar biasa, tapi kita juga perlu jangan sampai melupakan itu fungsi pelayanan yang kecil-kecil ini saya kira Ibu Dirjen kecil, tapi ini apalagi di musim media di zaman media sosial seperti ini. Bayangkan kemarin tadi Bu Cen sudah sampaikan soal apa sayap pesawat itu bisa menabrak ya, ini kan pasti orang bilang ada *nggak* yang mengatur itu? Masa kok atau pilotnya lagi ngantuk atau apa? Masa kok bisa menabrak *gitu*? Apa tidak ada pengaturan tidak ada yang memandu dan sebagainya? Ini kan semua pertanyaan masyarakat kita yang sudah sangat kritis hari ini. *Nah*, oleh karena itu fungsi regulator ini saya sarankan untuk benar-benar ditingkatkan Bu Menteri, Ibu Dirjen hal-hal yang kecil seperti ini.

Nah, kemudian saya juga menyarankan tadi soal bandara-bandara perintis itu sekali lagi dilihat juga yang sangat mendesak mana, yang mendesak itu yang kita perbaiki apa kebutuhannya, karena saya lihat ini banyak juga yang kita lakukan itu sebenarnya tidak mendesak, bukan itu yang paling mendesak. Jadi, mungkin perlu dilakukan lagi peninjauan yang lebih mendalam, penelitian yang lebih mendalam sesungguhnya apa yang dibutuhkan bagi bandara-bandara perintis itu.

Ada contoh saya kasih contoh Ibu Dirjen, di Bandara Morowali itu sebenarnya yang dibutuhkan perpanjangan landasannya Pak-Bu, tapi saya lihat yang dibangun sekarang 2023 ini adalah pelatarannya saya lihat tempat parkir dan sebagainya, padahal yang mendesak itu adalah landasannya. Tempat parkir mah ndak ada masalah Ibu, biar biasa-biasa saja dulu, tapi yang paling mendesak itu landasannya diperpanjang sehingga ini bisa melayani masyarakat yang memang Ibu Dirjen tahulah di sana sampai 4-5 kali *flight* setiap hari dengan pesawat yang kecil itu, padahal kalau misalnya ini kita bisa perpanjang *runway*-nya sehingga bisa pesawat yang besar ini juga bisa memberi pendapatan bagi negara tentunya.

Saya kira ini saja Ibu Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Saya terakhir Pak Pimpinan, saya ingin menyampaikan beberapa hal ini, ini aspirasi langsung dari beberapa Bupati. Yang pertama, Pak Dirjen Perhubungan Laut ini, Pak, dari Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yaitu fasilitas Dermaga Laut Lokodidi Pak, ini sangat mendesak juga dalam rangka menunjang tadi program itu. Kemudian, Dermaga Banggai Kepulauan Pak Menteri, Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan itu, itu adalah kalau saya tidak salah adalah pelabuhan milik kementerian ya. Jadi, tidak tidak sulit saya kira untuk dan Pak Bupati siap kalau ada kewajiban Pemda, Pak Bupati siap untuk untuk mendukung sepenuhnya yang penting pelabuhan ini bisa diperbaiki atau dibangun.

KETUA RAPAT:

Proposalnya saja, buat proposalnya ada?

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si):

Ya?

KETUA RAPAT:

Proposal saja kalau ada.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si):

Proposal ada.

KETUA RAPAT:

Ya, nanti diberikan biar cepat.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si):

Kemudian dari Kabupaten Banggai Laut, ya, terima kasih Bu Dirjen Perhubungan Udara tadi saya lihat sudah ada pembangunan bandara di Banggai Laut, itu memang menjadi sangat-sangat prioritas bagi masyarakat kita yang ada di sana. Kemudian, dari Kabupaten Morowali ada pembangunan terminal Tipe A, Pak, karena di Morowali ini ada tempat kawasan industri di sana dalam rangka mendukung kawasan industri Pak Dirjen. Saya kira itu saja yang saya sampaikan.

Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan.

*Wallahul musta'an,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik.
Selanjutnya Ibu Irine, kami persilakan.

F-PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos, MCOMN&MEDIASST):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Selamat pagi,

Pak Dirjen dan Bu Dirjen,

Saya Irine, saya dari Maluku Utara, ini salam kenal, karena ini pertama kali kita bertemu dan tentu saya dipindahkan oleh Fraksi ke Komisi V ini pasti ada tujuan khususnya untuk pembangunan di Maluku Utara yang lebih lagi, karena ini tadi Pak Dirjen saya suka sekali presentasinya, ya, Pak Dirjen, ya, jadi tema RKP tahun 2023 dengan 8 arah kebijakan ini inklusif dan berkelanjutan itu menjadi prinsip utama, sehingga saya pikir ini permasalahan yang ada di Maluku Utara menjadi sangat relevan.

Ini saya ingin mengangkat yang pertama adalah tentang angkutan laut perintis. Jadi, ini kalau saya tidak salah mencatat karena ini ada surat dari Gubernur juga yang telah disampaikan kepada Kementerian, ini d-cc kan ke Pak Dirjen, ini *follow up* dari rapat koordinasi tanggal 26 April tahun 2022. *Nah*, ini bahwa mengenai Angkutan Laut Perintis Pangkalan Pelabuhan Ternate Pak, ini terkait dengan trayek R-62, ini melayani...melayani dua *route*, *route* A dan *route* B yang di mana *route* A itu Ternate-Mayau-Tifure-Bitung-Tifure-Mayau-Ternate kembali lagi dan *route*...*route* B ini cukup panjang sekali ada Ternate-Jailolo-Bataka-Posi Posi sampai dengan Tepeleo dan juga Gebe PP.

Nah, yang menjadi masalah Kemarin saya juga sudah melihat secara langsung adalah kapal yang melayani ini adalah Kieraha II ya, Pak, ya dan ini sudah sangat tidak layak karena kecepatannya itu sudah di bawah 5 kilo not dan juga mesinnya juga *udah* sering mogok. Jadi, ini surat gubernur juga saya pikir mungkin harusnya Bapak sudah terima ini minta ganti Pak. Tentu saya juga sangat mendukung kalau Bapak bisa mengupayakan peremajaan Kapal Kieraha II yang melayani dua *route* tersebut. Ini menjadi sangat vital untuk kami di Maluku Utara untuk meningkatkan konektivitas dan juga distribusi barang di wilayah-wilayah tersebut, itu yang pertama Pak Dirjen.

Lalu juga, reses yang lalu saya juga mengunjungi ini Pelabuhan A. Yani Ternate, di mana sekarang itu Pak, panjang sekali antrean *gitu* karena memang itu juga menjadi *docking*, ya, *docking* ngisi bahan baku, bahan bakar dan segala macam, sehingga ini mohon Pak, dapat dibangun penambahan dua jalur pelabuhan untuk Pelabuhan A. Yani Ternate.

Nah, selain ini yang masih di Ternate juga yang ingin saya sampaikan Pak Dirjen, ini rehabilitasi Pelabuhan Semut Mangga Dua ini fasilitas darat terminalnya Pak, ini kemarin terjadi cuaca ekstrem, angin kencang sekali, sehingga beberapa titik itu di Pelabuhan Mangga Dua Ternate itu rusak parah dan tidak bisa melayani masyarakat dengan kondisi prima. Jadi, genangan air itu luar biasa Pak, sementara kita tahu bahwa Pelabuhan Mangga Dua itu menjadi pelabuhan utama untuk kita menyebrang ke Halmahera dari Ternate. *Nah*, sebagian besar ASN itu tiap hari pakai pelabuhan itu. Jadi, dari Mangga Dua ke Sofifi ataupun Mangga Dua ke pelabuhan-pelabuhan lain di di Halmahera.

Ini juga Pak, terkait rehab, ini juga ada Pelabuhan Hiri, ya, Pak, ini yang saya tahu ini rehabilitasi di pelabuhan Hiri itu sudah masuk di dalam RKA, Pak, kelengkapan data juga sudah ada, jadi mohon sekali Pak, untuk pengawalan program ini karena memang sangat *urgent* kami menilai ini aktivitas masyarakat Pulau Hiri itu memang sebagian besar itu kan dia terpencil ya Pak,

dia, jadi sebagian besar memang kita pakai transportasi laut untuk menyebrang. Jadi, tolong Pak, Hiri ini di...di...di diperhatikan.

Nah, juga untuk terakhir untuk Pak Dirjen Perhubungan Laut, ini kemarin kita baru saja secara sukses melaksanakan Sail Tidore Pak, ini sukses sekali APBN yang tercurah di situ untuk pembangunan infrastruktur saya pikir cukup baik dan ini kita terima kasih sekali untuk itu, tetapi mungkin menyisakan beberapa PR, terutama untuk kaitannya dengan pariwisata. Jadi, Maitara sebagai salah satu ikon Maluku Utara yang ada pulaunya itu gambarnya di uang seribu Pak, ini kita *nggak* punya pelabuhan ferry di situ. *Nah*, kalau umpamanya turis banyak segala macam itu nanti bagaimana *gitu* solusinya?

Nah, untuk Ibu Dirjen Perhubungan Udara, Bu, Maluku Utara ini lucu Bu, jadi penduduknya paling besar ada di Halmahera *gitu*, paling...paling rata-rata di Halmahera, tetapi kita yang paling aktif itu pelabuhannya ada di eh apa bandaranya ada di Ternate. *Nah*, untuk yang Morotai saya terima kasih sekali karena peremajaan dan rehabnya pembangunannya terus dilakukan karena menjadi salah satu yang diprioritaskan untuk pariwisata, tetapi jangan dilupakan juga Bu, untuk yang di Kao, ya walaupun selama ini banyak melayani untuk pekerja tambang kalau bisa ditambah untuk yang komersil di perbanyak, karena apa, karena kita tahu bahwa di Ternate itu kan risikonya tinggi Bu, kalau Gunung Gamalamanya batuk sedikit itu saya pernah 10 hari *nggak* bisa pulang ke Jawa *gitu loh*. *Nah*, itu menjadi masukan untuk saya, saya pikir bandara di Ternate semakin hari semakin baik, terima kasih. Kalau dulu teman-teman saya datang ke Ternate dibidang bandaranya benar-benar kayak kecil sekali, tapi sekarang puji Tuhan, *alhamdulillah* semakin hari semakin baik. Saya mohon perhatiannya untuk bandara-bandara di daerah lain di Maluku Utara.

Terima kasih Pimpinan atas kesempatannya.

KETUA RAPAT:

Baik.

Setelah Ibu Irine, kita lanjut ke Pak Willem Wandik. Silakan, Pak Willem.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik, terima kasih.

Pak Ketua dan Teman-teman Anggota Komisi V, dan juga Ibu Dirjen sama Pak Dirjen serta seluruh jajaran,

Dari kami saya singgung kembali terkait apa yang pernah kami sampaikan pada pertemuan lalu, perlu mengevaluasi kembali kinerja Kepala Navigasi Kelas 2 Jayapura, di mana beberapa waktu lalu itu apa dalam kondisi yang tidak layak dipaksakan harus berangkat, sementara kapalnya *trouble* dan dinamonya juga sudah rusak dan itu dipaksakan dililit dan harus berangkat tanpa mempertimbangkan keselamatan berlayar dan...dan seringkali terjadi seperti itu, sementara kondisi di Papua itu memang alamnya begitu ekstrem, baik di laut maupun di darat di udara, bahkan juga baru-baru terjadi insiden

yaitu pada tanggal 7 Januari itu ada *speed boat* yang membawa 14 penumpang itu tenggelam di perairan Serui dan di antaranya 2 meninggal dunia dan ada 3 penumpang yang belum ditemukan dan hari ini masih dalam sampai hari ini masih dalam proses pencarian. Sebenarnya, hal-hal seperti ini sebenarnya sepele, tapi karena kurangantisipasi sehingga bisa terjadi seperti ini dan di sini kami membutuhkan perhatian dari Teman-teman Ditjen Kelautan dan juga BMKG dan juga Basarnas dibutuhkan kerja sama yang baik ketika terjadi insiden seperti ini dan juga dan juga peran daripada BMKG juga dibutuhkan.

Seperti halnya pernah disampaikan dalam pertemuan Komisi V di tahun lalu bahwa diharapkan supaya setiap warga kita itu selalu punya *update* informasi terkait cuaca kekinian, sehingga warga itu ketika berangkat dari dan ke tujuan itu memiliki informasi yang akurat sehingga bisa mempengaruhi sikap mereka apakah berangkat atau tidak, tapi kalau kurang informasi sehingga ketika terjadi insiden kadang-kadang juga kita disalahkan, baik kami dari Komisi Anggota beserta juga Pimpinan Komisi V dan juga mitra. Oleh karena itu, tentunya ini menjadi perhatian.

Dan, berikut terkait dengan hingga hari ini kami melihat luar biasa terjadinya permainan harga tiket pesawat di seluruh maskapai penerbangan. Kami tidak tahu apakah ini memang ditentukan oleh pihak maskapai atau memang ada kerja sama dengan kementerian? Karena terus terang saja harga tiket dari Jakarta-Jayapura itu atau Timika hampir seluruh Papua itu melampaui harga tiket dari sini kita ke Eropa. Dari sini sampai ke Eropa *nggak* sampai 15 juta, tapi ke Papua itu 20-an juta lebih dan ini mempengaruhi *cost* dan inflasi hampir seluruh sektor di tanah Papua, bahkan kami dari Jayapura mau terbang ke mana-mana harus dengan harga yang mahal atau katakanlah di kampung saya di Tolikara mau ke itu ada 13 pesawat lapangan perintis, mau ke sana harganya luar biasa kita harus *charter*, sekali terbang 50.000, pulang 50.000, coba bayangkan dan sehingga semakin tingginya harga pesawat dari Jakarta-Papua mempengaruhi seluruh harga-harga barang di tanah Papua.

Tentunya ini menjadi perhatian, apalagi kalau saat mudik atau mudik Lebaran atau Natal itu luar biasa, ini sangat mencekik rakyat Papua dan ini memberikan pengaruh besar terhadap berapapun uang dikirim ke tanah Papua nilainya selalu berkurang, tapi selalu Jakarta selalu merasa *wah* kita sudah kirim uang banyak, pembangunan *nggak* nampak, padahal apa, ini dipengaruhi oleh kebijakan yang memang tidak pernah dikontrol baik oleh Jakarta. Terjadi pembiaran yang luar biasa.

Dan, yang berikut untuk Dirjen Laut, di Jayapura itu hingga hari kami punya galangan kami belum punya galangan kapal, tentunya kami sangat mengharapkan supaya setiap kapal kalau terjadi kerusakan atau mau buat satu proses *maintenance* tidak harus dibawa ke Makassar atau Jawa, tapi biarlah itu di Jayapura bisa masuk *dock* di Jayapura, tidak harus dibawa keluar karena itu membutuhkan biaya yang besar.

Dan, juga Ibu Dirjen Udara, di kampung saya itu ada 12 eh hampir 13 perintis dari kabupaten ke kecamatan-kecamatan itu semua harus pakai pesawat, tidak ada jalan darat. Dari petugas atau pejabat terkait dari kabupaten

mau *ngantarin* jatah beras atau gaji kepada pegawai-pegawai mantri atau tentara atau polisi tugas di kecamatan-kecamatan di desa-desa harus diantar pakai pesawat, itu pun harus di-*charter*. Beda dengan di sini, semua akses terkoneksi baik laut, darat, udara semua terkoneksi, tapi setiap tahun ke bagian anggaran hanya untuk peningkatan kenyamanan supaya tidak macet, supaya lebih nyaman, kita di sana ini luar biasa, tapi kita tidak pernah kita mengeluh.

KETUA RAPAT:

Sudah?

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Ya untuk sementara itu dulu, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke ya.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, baik.
Lanjut Saudari, Sadarestuwati.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya tidak akan bertanya-tanya hanya sekedar mengingatkan saja dari, iya saya *nggak* boleh banyak bicara kata dokter Sri Rahayu. Jadi, saya hanya mengingatkan saja Bu Dirjen-Pak Dirjen berkaitan dengan pembangunan-pembangunan baik itu bandara maupun pelabuhan. Tentunya kami senang, kita pasti rakyat Indonesia pasti senang, akan tetapi tolong juga dievaluasi jangan setiap pengajuan bandara atau pelabuhan itu begitu saja disetujui. Kami tidak menginginkan kejadian-kejadian yang sering terjadi di masa-masa yang lalu, di mana dalam pembangunan ketika pembangunan sudah berjalan, apalagi itu di tanah yang dalam tanda kutip belum *clear* kemudian menjadikan masalah, bahkan ada salah satu pembangunan pelabuhan kalau *nggak* salah di Bengkulu ya yang tanahnya juga masih menjadi masalah karena pemilik tanah pernah menghadap ke saya meminta agar diselesaikan.

Nah, begitu juga dengan saat ini pengajuan-pengajuan pelabuhan juga yang beberapa waktu kita yang lalu kita tinjau, ini juga tanahnya bukan di atas tanah yang sudah *clear* miliknya dari kementerian, akan tetapi milik dari TNI katakanlah. Ini tolong di-*clear*-kan betul apabila itu ditindaklanjuti.

Kita tahu juga bandara-bandara kita yang kepemilikan lahannya bukan milik kementerian, ini pun menjadi masalah sampai dengan saat ini. Membangun itu sangat mudah, tetapi menyelesaikan masalah di belakangnya inilah yang akan makan waktu yang cukup panjang. Bukan hanya waktu, tetapi juga energi yang dikeluarkan juga akan cukup besar, maka dari itu tentunya kami mengapresiasi semua capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Kementerian Perhubungan ini, akan tetapi di akhir masa jabatan presiden semua harus hati-hati, jangan di akhir masa jabatan banyak pekerjaan yang akan menjadi masalah. Itu saja dari saya sekedar mengingatkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sebelum saya lanjut saya ingatkan kita semua, harusnya kita *break* makan jam 12.00. Kita sepakat mau di-*break* apa mau lanjut? Ya? Selesaikan? Kalau selesaikan berarti jam 01.00 harus selesai ini, jam 01.00 selesai ya? Jadi kita lanjut ini tinggal 5 orang lagi. Kalau 1 orang. Ya, jadi kita sepakat dulu sekarang kalau tidak di, ini ini saya buka supaya kita berdialog sama-sama ya kan, supaya nanti bisa kita nanti makan bersama juga, jadi kalau kita bersepakat jam 01.00 kita semua sepakat tidak makan sampai jam 01.00 ya? Ya, baru kita sama-sama dengan mitra. *Oke* ya? Jadi, kita jam 01.00 selesai ya? *Oke*, jadi kita lanjut selesaikan sampai jam 01.00 ya?

(RAPAT: SETUJU)

Ini saya sudah ketuk.

Baik, lanjut berarti kalau 1 orang paling lama 5 menit, berarti 25 menit selesai. Pak M. Aras, silakan. Ingat waktu ya.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Kawan-kawan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen Perhubungan Laut, Perhubungan Udara
dan seluruh jajaran yang saya hormati dan saya banggakan,**

Pertama-tama, tentu setelah mendengarkan secara seksama pemaparan dari Pak Dirjen Laut dan Ibu Dirjen Udara, tentu berita yang sangat

menggembirakan bahwa PNBP-nya yang sangat memuaskan, tentu kita patut mengapresiasi bahwa dalam keadaan pandemi masih ada

KETUA RAPAT:

Pak Aras?

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Ya?

KETUA RAPAT:

Itunya dimajuin biar jelas.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Oh ya, saya maju atau?

KETUA RAPAT:

Ya, *mic*-nya biar lebih dekat.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih.

Dengan hasil yang cukup memuaskan tentu kami mengapresiasi segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh teman-teman dari kementerian sehingga tentu juga bisa memberikan apa namanya angin segar bagi pendapatan negara sehingga bisa menutupi APBN yang tentu kita harapkan bahwa akan stabil sampai kepemimpinan Jokowi akan berakhir.

Yang kedua, tentu di dalam hal pencapaian, ada hal-hal yang belum maksimal yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Laut yang terutama terkait dengan pembangunan, pengembangan pelabuhan utama yang memenuhi standar. Ini ini kan kita daerah kepulauan, ya, tentu berharap bahwa fasilitas-fasilitas laut ini yang menjadi prioritas sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan tentu di sana juga banyak bisa didapatkan tentang terkait dengan PNBP tentu kita harus maksimalkan, apalagi targetnya kemarin ada 7 target hanya 4 yang terealisasi. Mudah-mudahan ke depan ini bisa ditutupi sehingga pemerintahan Jokowi betul-betul bisa menyelesaikan seluruh program yang dicanangkan selama 5 tahun terakhir ini.

Kemudian, yang selanjutnya terkait dengan keadaan negara kita juga yang saya sampaikan tadi negara maritim, tentu fasilitas-fasilitas yang terkait dengan layanan masyarakat terus harus kita tingkatkan, baik itu layanan di kepulauan maupun di pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan antara beberapa pulau dengan pelabuhan yang ada, terutama seperti di Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan, ini memiliki pulau yang sangat banyak kurang

lebih 71 pulau yang berpenduduk, tentu memerlukan perhatian dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Laut untuk bisa memaksimalkan layanan kita kepada masyarakat. Tentu fasilitas-fasilitas yang lainnya harus juga didukung.

Lalu, kemudian beberapa pelabuhan di Sulawesi Selatan, saya lihat bahwa memang sudah ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Laut, tetapi belum begitu maksimal, terutama di Bulukumba, di daerah Kajang belum dilaksanakan lagi lanjutan dari pembangunan pelabuhan yang ada di sana. Kemudian, di daerah Barru khususnya untuk Pelabuhan Garongkong ini juga terus harus kita tingkatkan sehingga layanan kita keluar bisa lebih maksimal.

Kemudian dengan Perhubungan Udara Ibu Dirjen, ini ini sesuai dengan pengalaman yang ada tentang layanan maskapai Bu, ya terutama di Terminal 2, Terminal 1, ini sering berubah-ubah jadwal ya, ya saya kemarin juga beli tiket untuk hari ini sedianya keluarga saya akan berangkat di pukul 06.00 malam ini, tiba-tiba baru saja ada WA-nya harus di diberangkatkan di pukul 09.30 malam. *Nah*, oleh karenanya ini kan tentu tidak ada kepastian bagi penumpang dan tentu ini harus diapa namanya dilakukan perbaikan-perbaikan layanan sehingga tidak ada yang dirugikan.

Yang kedua, juga sering berubah-ubah *gate*, kita mau nunggu di *gate* A misalnya, tiba-tiba di yang lain harus naik pesawatnya. Kadang-kadang kasihan yang orang tua harus berlari ke sana kemari hanya untuk mengejar pintu masuk dari pesawat itu sendiri, sehingga ini mohon perbaikan layanan ini sehingga masyarakat ini betul-betul bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang janji oleh pemerintah bahwa layanan itu bisa dimaksimalkan di seluruh penumpang sebagai hak sebagai layanan kita. Ya mereka kan juga bayar tentang layanan bandara kan sampai kurang lebih 160.000 kalau *ndak* salah per penumpang.

Nah, perlu ini harus dituntaskan segera karena bukan persoalan hari ini saja, ini persoalan yang sudah lama yang terus-menerus. Begitu juga dengan hari ini yang begitu padatnya penumpang ya, sehingga tentu ini berkesempatan saya lihat bahwa maskapai juga menaikkan biaya penerbangan juga ini juga perlu diawasi sedemikian rupa sehingga mereka tidak seenaknya untuk menaikkan biaya tiket pesawat dan juga seolah-olah apa namanya kalau kurang misalnya sampai 50% saja terisi pesawatnya itu di-*cancel* dan di digabung ke penerbangan yang lain. Ya berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, sehingga ada kepastian dari penumpang bahwa dia akan misalnya berangkat jam 07.00 ya dia akan juga terealisasi jam 07.00, sehingga apa yang menjadi tujuan mereka juga bisa terpenuhi.

Dan yang terakhir, tentu terkait dengan layanan khusus di Sultan Hasanuddin, ini kemarin juga harus kami sampaikan bahwa ini pembangunan di sana ini sesegera mungkin dilanjutkan, sehingga layanan-layanan kita bisa lebih maksimal. Yang kedua, Arung Palakka yang kemarin anggarannya sudah masuk ya mudah-mudahan ini cepat diselesaikan, dikerjakan sehingga tentu layanan kita bisa lebih maksimal untuk melayani daerah Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai, sehingga mereka juga bisa menikmati layanan dari kementerian kita

dari Kementerian Perhubungan Udara, dalam hal ini Dirjen Udara, tentu ini kita harapkan bahwa layanan kita bisa lebih maksimal melalui Kementerian Perhubungan. Barangkali itu, Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Iya, lewat dua menit itu.

Baik, selanjutnya Pak Muhammad Fauzi. Paling lama 5 menit Pak Muhammad.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Ya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pak Wakil Pimpinan, Teman-teman Komisi V, Ibu Dirjen, Pak Dirjen,

Saya singkat-singkat saja.

Pak Dirjen-Bu Dirjen,

Yang pertama, untuk Dirjen Perhubungan Laut. Dari sisi anggaran laut tahun 2022 dengan Pagu sebesar 9,28T, realisasinya 9,03 triliun tahun 2022 ini, jadi sebesar apa 9 apa sebanyak 25 triliun tidak terserap Pak, karena yang terserap hanya apa...apa yang tidak terserap 2,56% Pak. *Nah*, 5 ini kenapa ini masih agak belum maksimal terserap Pak? Kemudian dalam undang-undang atau nanti dulu Pak, ini dulu Pak, biar bahan ini dulu saja Pak, ya.

Kemudian untuk PNPB luar biasa, Pak, mudah-mudahan target PNPB yang cukup baik ini menjadi apa tambahan lah untuk kegiatan-kegiatan yang yang lainnya.

Kemudian di paparan Bapak juga disinggung mengenai pembentukan *route* pelayanan yang saling terhubung yang tahun 2022 baru sebesar 27% Pak, atau 37 trayek yang sudah terhubung, sementara 138 belum. *Nah*, ini saya ingin mengetahui Pak, untuk di Sulawesi Selatan masuk yang 37 atau yang 101 Pak, *gitu*? Termasuk di Dapil saya Pak, Pelabuhan Munte Pak, masuk yang mana, Pak? Atau mungkin juga tidak masuk dua-duanya Pak, *gitu* Pak. *Nah*, saya ingin mengetahui ini Pak, karena hampir setiap rapat saya agak bosan juga Pak, selalu saya sampaikan Munte, selalu tidak dapat. Kemarin pun ada ruang tapi juga tidak masuk, alasannya perencanaannya belum ada di 2022 *gitu*, selalu tertinggal, padahal Munte ini Pak, sering saya katakan pada saat terjadi putus jembatan Pak, terutama di Kabupaten Luwu Utara ke sana Pak, Luwu Utara, Luwu Timur, Munte itu menjadi sarana apa laut menjadi sarana

transportasi alternatif Pak, *gitu*, karena kalau putus itu bisa satu bulan dua minggu Pak, *gitu*. Saya minta tolonglah untuk 2024 masa ndak masuk lagi Pak.

Kemudian, kemudian di apa di dalam Undang-Undang Nomor 17 Pak, Tahun 2008 ini ada pemisahan Pak, ya antara fungsi regulator dan operator khususnya di pelabuhan Pak. *Nah*, tapi kenyataannya sekarang ini Pak, sekarang sudah terang benderang Pak, misalkan Pelindo apa, Pelindo masih monopoli Pak, dia dia regulator, dia juga operator Pak. *Nah*, saya pingin tahu ini Pak, bagaimana pendapat Bapak, Pak *gitu*? Masih masih berjalan sampai sekarang Pak.

Berikutnya, saya ingin menyinggung mengenai Pak, ini di luar konteks ini Pak, ya mengenai lamanya pelayanan di pelabuhan Pak, terutama dalam pengangkut apa bongkar barang, sampai kapal berangkat Pak. Presiden pernah mengakui bahwasanya kita yang terlama Pak, dalam pelayanan ini Pak, apa bahkan negara kerugian kalau tidak salah 780 triliun Pak, per tahun Pak, *gitu*. Kita ini terlama, salah satu presiden sampaikan Pak, alasannya adalah koordinasi Pak.

Nah, dalam koordinasi memang kalau saya sih kalau lihat alasan ini *nggak* kaget *gitu* karena kita saja dalam menyepakati kesepakatan yang sudah kita sepakati di Komisi V ini koordinasinya lama sekali di bawah Pak, apalagi keluar *gitu*. Jadi, tolonglah hal-hal yang sifatnya apa pelayanan kepada masyarakat apalagi dalam dunia usaha, termasuk komitmen-komitmen yang dibangun di Komisi V ini tidak terealisasi karena memang masalahnya koordinasi Pak, sangat lemah sekali di Perhubungan ini koordinasinya *gitu*. Nanti kalau kita mau lebih jelas saya ada datanya Pak, itu.

Kemudian untuk apa, udara, untuk udara ada program pelatihan Bu ya mengenai kualitas pelayanan, apa nama program Smart atau apa begitu ya Bu, ya itu bagaimana Bu, perkembangannya? Karena kalau bicara pelayanan kenyamanan pelayanan kan *output*-nya itu kan kenyamanan Bu, dan keamanan. Sampai sekarang ini kalau bicara pelayanan masih sama-sama kita kunjungi ke bandara misalkan di Sulawesi Selatan di Hasanuddin. Saya pernah bicara dari ruangan ke ruangan Bu, pada saat kita kunjungan di sana, sampai sekarang *nggak* ada perubahan itu, *nggak* ada perubahan mulai kapasitas bangku yang tidak muncul, yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang, ruang tunggu, apa, pintu masuk keberangkatan internasional cuma satu pintu, orang numpuk antara penumpang luar negeri dan dalam negeri, sampai sekarang *nggak* ada perubahan itu. Troli yang dipakai troli rusak mayoritas *gitu*. Jadi, buat apa juga kita ini sering bicara seperti ini berbusa-busa tapi tidak ada artinya Bu. Tolonglah ini diperbaiki, sementara tiket mahalnya luar biasa.

Nah, pelayanan tadi kawan saya Pak Aras satu provinsi sama saya di Dapil, apa, di Dapil yang berbeda juga menyampaikan itu, cuma saya menajamkan lagi *gitu*. Itu ada Pak Hamka juga itu.

KETUA RAPAT:

Sudah lewat 5-6 menit.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Iya, sedikit lagi.

Kemudian, apa mengenai Bandara Bali, ini cukup lama terhenti, Bu, padahal pengajuannya di 2017, ini alasannya karena Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan izin, sehingga ada apa ya ada investor yang akhirnya menarik diri, di apa, dari kegiatan itu Bu. *Nah*, ini kan sayang Bu, *gitu* ya, padahal bandara ini masuk rencana induk bandar bandar udara *gitu*. *Nah*, ini saya ingin tahu Bu, kira-kira sebabnya apa Bu, itu?

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, baik.

Lanjut Pak Eddy Santana, sama lima menit, Pak Eddy.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan beserta seluruh Anggota yang saya hormati,
Dirjen Perhubungan Laut,
Dirjen Perhubungan Udara,
Beserta jajaran,**

Yang pertama, untuk Dirjen Perhubungan Laut. Saya masih terus tidak henti-hentinya menanyakan *gitu* mengenai kelanjutan pembangunan Tanjung Carat. Kemarin ada menteri malah saya salah Tanjung Api-Api malah. Tanjung Api-Api kan sudah pindah, Tanjung Carat sekarang yang diserahkan ke BUMD, tapi sekarang belum ada gerakan yang pasti *gitu* untuk pembangunan itu apa jadi apakah tidak itu. *Nah*, menurut saya harus ada masuk juga walaupun sedikit dulu APBN di situ Tanjung Carat. 1-2 tiang pancang lumayan lah *gitu* ya, sehingga ada kepastian Tanjung Carat itu jadi dibangun Pelabuhan Samudra karena itu memang sangat penting sekali untuk Sumatera Selatan. Adanya pelabuhan itu bisa mengeluarkan semua hasil sumber daya alam, kemudian juga hasil perkebunan seperti CPO *gitu* ya, sawit ya CPO ke Tanjung Carat itu. *Nah*, ini ini mohon Pak Dirjen ya.

Untuk Dirjen Perhubungan Udara, juga berkali-kali saya sampaikan Silampari, Bandara Silampari. *Nah*, mungkin ini pertama berhadapan Bu ya kita, padahal Silampari itu dianggarkan 50 miliar awalnya perencanaan, kemudian diturun menjadi 30 *gitu* kalau tidak salah 30, kemudian 20, *nah*, sekarang tinggal 10, sedangkan itu menurut saya bandara yang sangat strategis termasuk untuk Pulau Sumatera *gitu* ya. Bandara kedua dari

Sumatera Selatan yang pertama sudah sangat eksis ya Sultan Mahmud Badaruddin 2, tapi kita buat lah bandara karena jauh sekali dari Palembang 8 jam sampai 9 jam jalan darat *gitu*.

Kemudian menyangkut beberapa kabupaten itu. Jadi, bisa pelayanan untuk 3,5,6 sampai 7 kabupaten di sekitarnya ini, bukan hanya Lubuklinggau, Musirawas, Muratara, tapi juga Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagaralam, kemudian Rejang Lebong, dan juga di Jambi Muara Bungo dan sekitarnya. Saya kira lebih dekat ke Lubuklinggau daripada ke Jambi *gitu*. Mereka sering ke Jakarta ini ya lewat kalau tidak lewat Bengkulu, lewat Lubuklinggau, lewat Bandara Silampari itu. Jadi, mohon sekali lagi mohon apakah juga nah ini Pimpinan RDP ini ada gunanya *nggak gitu*? Kalau hanya formalitas ya saya kira *nggak* perlu lama-lama dilakukannya, sudah buka tutup saja *gitu*. Ini RDP ini apa yang ditanyakan atau yang diusulkan oleh Anggota Komisi V memperjuangkan Dapil-nya karena kita disumpah untuk memperjuangkan Dapil-nya masing-masing. *Nah*, itu harus juga dipantau *gitu* dari sekretariat mungkin ada catatan-catatan RDP ini dipantau bagaimana selanjutnya, apakah nanti RDP selanjutnya gini lagi *gitu*, tidak ada sama sekali hasilnya itu, terutama untuk kami ya di Dapil Sumatera Selatan I. Saya kira ini Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih. Jadi, kalau dibilang RDP ini tidak ada artinya ya kalau kita bicara itu saya kira ada artinya, ini pengawasan kita ya, dan kita membahas apa yang sudah kita putuskan, tetapi kita bicara Dapil ke depan saya kira nanti itu yang saya ingin kita bahwa setiap ini tidak ujung-ujug kita bahas di ujung, tapi mulai dari perencanaan ya supaya Pak Dirjen-Bu Dirjen perencanaan itu nanti kita harus mulai. Jadi, apa yang disampaikan teman-teman itu harus bisa menjadi aspirasi di dalam perencanaan juga oleh mitra. Jadi, maka itu yang nanti kita fokus di sana ya. *Nah*, kemarin tidak, kita di ujung-ujug saja iya kan, tidak ada di perencanaan mau masuk ini sudah ada semuanya. Ya ke depan tidak. Untuk itu kita supaya tidak terlalu panjang ya makanya nanti di perencanaan baru kita bicara tentang aspirasi 2024.

Baik selanjutnya Pak Hamka, kami persilakan. Waktu makin berkurang karena sudah mau jam 01.00.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya tidak terlalu lama. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Pak Dirjen khususnya di Kementerian Perhubungan terkait mekanisme penganggaran ya, saya tolong disampaikan supaya jangan terjadi perbedaan Lapsing kita kesimpulan apa yang diputuskan di sini berbeda dengan apa yang Bapak anggarkan, sekecil apa pun itu, karena itu tidak seperti itu mekanisme penganggaran kita. Saya tahu ada yang lebih tinggi, Pak, Pak Dirjen Laut

barangkali ada turun, Darat *eh* apa namanya Udara lebih tinggi, ini perlu penjelasan dan mekanisme yang benar, jangan nanti sampai pada rapat ini baru disampaikan tolong dibuatkan surat apalagi dasarnya surat Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan ya. Ini saya ingatkan, ini tidak lazim karena pengawasan kita tentu berdasarkan pada Lapsing yang kita sepakati di sini bersama menteri dan Dirjen, itu yang pertama.

Yang kedua, saya apresiasi terhadap apa yang dicapai kaitannya dengan PNBP. Begitu tingginya di laut ini 127% itu luar biasa, itu terima kasih, tetapi ada yang harus kita perhatikan Pak, bahwa memang PNBP itu memang harus kita genjot untuk mencapai yang maksimal, ternyata Bapak mungkin lebih besar lagi yang akan datang ya.

Nah, maksud saya kaitannya dengan PNBP ini juga terkait juga dengan subsidi ya, di satu sisi Bapak menerima PNBP, di lain sisi ada subsidi yang harus dikeluarkan dari APBN, itu tidak sedikit juga. Yang kami ingin mempertanyakan di sini adalah khususnya misalnya di dua sektor ini penerbangan udara dan laut, subsidiya itu *input* atau *output*? Tetapi kalau kita melihat apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan khususnya di Dirjen Laut, subsidiya itu *input* bukan pada *output* karena *output*-nya jelas pada kesamaan harga di daerah terpencil itu *output*-nya, tapi yang kami ingin tahu ini subsidi *input*-nya itu seperti apa sih *exercise*-nya? Bagaimana cara memberikan subsidi kepada Pelni? Bagaimana cara memberikan subsidi kepada pengangkut ternak? Itu namanya subsidi *input* bukan subsidi *output*.

Nah, oleh karena itu Pimpinan terkait dengan subsidi ini saya minta penjelasan khusus kalau perlu ditingkatkan menjadi Panja kalau bisa karena kita tidak pernah diberikan suatu *exercise* bagaimana subsidi itu. Saya paham bahwa Kementerian Perhubungan itu sangat banyak kemungkinan untuk mendapatkan PNBP, saya tahu. *Nah*, oleh karena itu mungkin ada *exercise* penjelasan khusus nanti atau rapat khusus nanti bagaimana subsidi *input* itu kepada mereka yang menerima subsidi itu. Di sektor udara misalnya ada subsidi fungsional, ada PNBP fungsional, ada yang non-fungsional. Ini harus kami dijelaskan Bu. *Nah*, oleh karena itu masih beberapa hal terkait dengan ini saya minta pada kesempatan ini Pimpinan barangkali kita agendakan tersendiri ya untuk membahas secara khusus mengenai subsidi *input* dan *output* ini.

Dan yang selanjutnya yang harus dibahas juga mengenai persoalan personal persoalan terminal khusus Pak Dirjen. Banyak yang mengganggu, banyak yang hiruk pikuk, ini juga salah satu sumber pendapatan negara bukan pajak. Ini juga harus dijelaskan karena berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 52 Tahun 2021 itu sudah Tersus itu kan sudah di atur semuanya di situ. Mungkin kita akan mengevaluasi pelaksanaannya seperti apa sih Tersus itu ya, mungkin ada masalah-masalah, mungkin sering Pak Dirjen juga saya *forward* permasalahan yang muncul dari daerah-daerah penghasil tambang dan sebagainya. Ini harus *clear* kita, supaya jangan kami tidak tahu apa-apa, lantas diserang atau ditanyakan oleh orang tertentu, kami tidak bisa menjawab, terpaksa kami harus *forward* ke Pak Dirjen *gitu*. Tolong dijelaskan ini nanti Tersus ini Terminal Khusus ini apa sih? PNBP yang kita peroleh itu di situ apa? Ini yang saya harapkan benar-benar kita bisa terbuka, kita bisa

membahas dengan baik. Kalau tidak bisa Panja, kita rapat khusus, khusus membahas ini Pimpinan. Saya kira itu saja yang penting saya sampaikan. Selamat Ibu Dirjen Udara telah menjadi Dirjen. Dari dulu saya mendoakan terus menjadi Dirjen, *alhamdulillah* terealisasi. Lima tahun yang lalu saya doakan jadi Dirjen *alhamdulillah* jadi Dirjen, Pak.

Makasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bukan doa Pak Hamka saja, Pak Lasarus juga ikut mendoakan, kita semua ya. Kita semua doakan Ibu.

Ya selanjutnya sebelum saya lanjut, nanti Pak Hamka saya kira itu usul baik kita masukin saja di kesimpulan bahwa kita ada rapat khusus tentang subsidi-subsidi dan Tersus dan lainnya ya supaya jelas dan di rapat khusus itu kita lihat kalau belum ini puas, kita naikin lagi ke Panja *gitu* ya.

Baik, selanjutnya Pak Sumail, sama waktunya.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya,

**Pimpinan yang saya hormati beserta segenap Anggota,
Ibu Dirjen Perhubungan Udara dan Pak Dirjen Perhubungan Laut beserta segenap jajaran,**

Sebelum saya mulai atau menyampaikan catatan-catatan saya, tentu saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Dirjen atas amanah dan jabatan yang baru ini. Saya yakin bahwa di tangan Bu Dirjen Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ini akan maju, jaya dan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kita, sekali di udara tetap di udara.

Tentu yang harus saya sampaikan pertama kali Bu Dirjen kaitannya dengan adanya capaian penerimaan negara bukan pajak yang dari target 1,3 menjadi 1,45 triliun. Ini satu prestasi yang baik kalau menurut saya, kendati pun masih banyak yang kita bisa sisir ya dan akan menambah lagi pendapatan negara diluar pajak.

Nah, pertanyaan saya begini, ada peningkatan terhadap PNBPN itu, bagaimana dengan pelayanan terhadap pengguna transportasi udara? Pasca pandemik covid ini Ibu sudah mulai banyak masyarakat berpergian menggunakan moda transportasi udara. Banyak kita dengar dari sisi pelayanan masih jauh dari apa yang kita harapkan, banyak *delay*, tapi yang ingin saya

sampaikan kepada Ibu adalah kaitannya dengan kelayakan dan kelaikan moda transportasi tersebut jangan sampai menimbulkan persoalan-persoalan yang akan menimbulkan korban. Saya melihat di sini kita masih sangat lemah, semoga Ibu sebagai panglima tertingginya nanti bisa menyelesaikan atau minimal mencoba mengurai yang selama ini menjadi hambatan-hambatan di transportasi udara.

Yang kedua Ibu, pernah saya sampaikan pada kesempatan rapat tempo hari bahwa kaitannya dengan pengembangan lapangan atau bandara Bandar Udara Abdulrachman Saleh di Malang. Malang selain kota wisata, kota pendidikan, kota budaya dan sudah banyak disinggahi oleh wisatawan, ini mohon perhatian khusus kaitannya dengan pengembangan atau pembangunan lapangan bandar udara yang ada di sana.

Ini saya kira dua hal saja ke Ibu Dirjen dan saya yakin bisa ditindaklanjuti ke depan karena juga tidak terlalu berat-berat amat, selebihnya bahwa selamat bertugas dan sukses selalu.

Kemudian kepada Bapak Direktorat Dirjen Perhubungan Laut. Pak Toha, dari realisasi anggaran di tahun 2022 terealisasi 9,3 triliun dari 9,28 triliun. Kira-kira 96% lah. Catatan kami dan saya perhatikan Bapak bahwa kenaikannya itu sangat fantastis biasanya antara November sama Desember seperti itu dan ini menjadi kebiasaan ya atau menjadi tradisi lah di sebuah lembaga dan kementerian. Namun demikian, harapan saya supaya kualitas dari pencatatan dan apa namanya serapan-serapan tersebut betul-betul berkualitas Pak, karena transportasi apa namanya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini juga menyangkut apa namanya mengkoneksikan barang, jasa, orang, lagi-lagi adalah terhadap pelayanannya untuk kemudian ditingkatkan.

Yang kedua, di RPJM 2020 ke 2024 ada target program prioritas kira-kira 138 konektivitas perhubungan laut yang harus tersambungkan, akan tetapi hari ini tahun 2023 baru 37 Pak, yang terhubung, masih jauh dari apa yang diharapkan. Satu tahun ini apa kira-kira strategi Bapak untuk bisa mencapai 138 itu Pak?

Yang kedua, saya melihat bahwa Labuan Bajo ini mendapat perhatian khusus nampaknya Pak, dari kementerian apa namanya dari Direktorat Perhubungan Laut ya kaitannya dengan penempatan dua kapal itu, apa sih sebenarnya urgensinya Pak, kapal tersebut ditempatkan di sana? Karena kalau saya lihat dari sisi keteraturan bahwa Labuan Bajo itu ya merupakan tempat wisata tapi kemudian transportasi untuk bagi wisatawan semrawut dan tidak teratur seperti itu, ini perlu ketegasan daripada KSOP. Bapak bisa perintahkan barangkali karena yang berwisata atau berlibur ke sana bukan hanya domestik, akan tetapi juga dari mancanegara.

Yang terakhir, harapan saya ada koordinasi yang baik atau peningkatan koordinasi dengan operator Pak, atau mitra kerja daripada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar pelayanan terhadap masyarakat dan juga keselamatan transportasi laut bisa terjaga dengan baik. Saya kira itu.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya Pak Mulyadi, ya tinggal satu lagi.

F-P. GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

**Pak Ketua Komisi V yang saya hormati,
Pak Ridwan Bae, Wakil Ketua dan Pimpinan Rapat Pak Roberth yang saya
banggakan,
Pak Dirjen-Bu Dirjen dan seluruh jajaran,**

Karena saya dibatasi waktu lima menit. Menit pertama tentu saya mengapresiasi dulu Pak, terkait kinerja dan segala upaya-upaya improvisasi terbaik untuk pengabdian di kedua Dirjen ini, ya mudah-mudahan terus bisa ditingkatkan. Namun demikian, sarapan anggaran saya selalu mengingatkan tidak boleh selalu menjadi indikator kinerja Pak, ya. Kami berharap indikator kinerja juga berorientasi kepada program-program anggaran yang tepat sasaran, tepat waktu tidak *delay*, tepat anggaran tidak membengkak ya Pak, dan kemudian mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik Pak, ya, terutama juga dengan melibatkan *stakeholder* di daerah. Kadang-kadang *project* nasional meninggalkan masalah di daerah ya.

Menit kedua, Sriwijaya. Saya ikut mendalami ini penting karena apa yang kita laksanakan hari ini kalau bahasa hukum keputusannya akan seperti yurisprudensi ini ya, jangan sampai nanti Bu ya negosiasi yang dilakukan terhadap pemenuhan hak korban, santunan itu jangan dinegosiasi Bu, kalau sudah aturan ya tegakkan aturan itu ya. Kalau santunan dinegosiasi itu tadi kan bahasanya nanti akan ke depan menjadi seperti yurisprudensi, alah Sriwijaya saja bisa, ini bahaya Bu, itu akan berkorelasi dengan reputasi dunia penerbangan kita ya. Saya masih ingat Air Asia waktu kena musibah, santunannya begitu cepat disalurkan ya. *Nah*, ini preseden negatif nih kalau Sriwijaya yang menjadi salah satu operator penerbangan Indonesia tidak melakukan hal yang sama. Jadi, kalau bahasa saya jangan sampai ada *hengky pengky* lah ya, realisasikan apapun yang menjadi hak korban.

Kemudian spesifik Ibu, Saya mengingatkan tentang Husein Sastranegara dan Kertajati. Saya ingin memastikan bahwa Ibu memiliki formulasi yang baik ya. Kalau Cisumdawu selesai sebagai konektivitas menuju Kertajati, jangan sampai Husein-nya juga ya terbengkalai, kenapa, karena ada

indikasi mohon maaf ini ada benturan kepentingan atau perang kepentingan Bu. Jadi, Ibu tolong keluarkan kebijakan yang sangat adil ya dan sosialisasikan dari awal supaya apa baik para penyelenggara di Husein maupun di Kertajati betul-betul tidak saling mencurigai atau saling menghambat. Saya kira ini masalah pelayanan buat masyarakat harus diprioritaskan.

Kemudian ini saya selalu mengingatkan tentang *traffic* yang sangat tinggi Bu. Kalau pagi menuju Jakarta ya itu ternyata diisi juga saya sendiri ngalami Ibu ya, kalau pesawat pagi saya harus menginap Bu di Hotel Bandara, kenapa, karena Jagorawi-nya pasti macet. *Nah, saya nggak* kebayang kalau misalnya Ibu membuat rencana atau kajian kalau Bandara ATS lah ya Atang Sendjaja Semplak itu dikaji memungkinkan *nggak* sih *gitu* untuk membendung *gitu* kan, bukan berarti tidak mengoptimalkan Husein, apa *sorry*, Halim ya Bu ya, tapi saya kira jumlah penumpang dari arah Sukabumi, Cianjur, Bogor itu luar biasa bu ya, kalau misalnya ada kajian barangkali itu menjadi salah satu opsi.

Menit ke-4 izin, Patimban Pak Dirjen Perhubungan Laut. Saya berharap Bapak memiliki rencana besar untuk Patimban Pak, ya, itu sudah menelan investasi yang luar biasa Pak. Saya berharap Bapak punya rencana untuk membuat bagaimana misalnya Patimban menjadi *port city* seperti Singapuranya lah ya. Kita di Patimbaan punya Singapuranya *gitu* kan, Singapura punya Indonesia tapi ada di Patimban, mudah-mudahan untuk menjadi proyeksi Bapak untuk mengembangkan ke depan.

Kemudian Pak, saya berharap di Perhubungan Laut kalau misalnya pelabuhan-pelabuhan yang notabene adalah menjadi destinasi wisata prioritas ataupun super prioritas apalagi, itu betul-betul bisa dioptimalkan Pak, ya. Saya selalu mengingatkan beberapa kali saya ke Labuan Bajo saya selalu iseng Pak, ke Multipurpose itu Pak, ya yang selesai dibangun itu angkanya besar Pak, tapi bongkar muatnya terjadi di luar *loh* Pak. Saya lewatin pelabuhan, *loh kok* ini ada bongkar muat di luar pelabuhan. *Nah*, barangkali harus sidak Pak, sekali-sekali karena saya sendiri secara iseng kadang-kadang suka melihat itu supaya saya punya materi sebagai bahan dari evaluasi.

Terakhir menit kelima, *roadmap*. Saya berharap dua Dirjen ini ya yang sedang mendedikasikan waktunya, saya berharap memiliki *roadmap* yang jelas dan kami diberikan materinya supaya kami ikut bisa monitor dan ikut menjiwai langkah kerja Bapak-Ibu beserta jajaran yang terhormat, sehingga pengabdianya bisa lebih maksimal. Konotasinya 3 Pak, aktivitasnya 3, pembenahan, optimalisasi seperti yang disampaikan di prolog Ketua tadi awal, dan terakhir pengembangan. Jangan sampai semuanya tadi Pak, tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, tidak tepat anggaran.

Terima kasih Pimpinan, menit kelima selesai.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Mantap.

Baik, selanjutnya Pak Ruslan tidak ada ya?

Lanjut Pak Boy, silakan, yang terakhir ini.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Baik, terima kasih.

**Pimpinan, Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Dirjen dan Ibu Dirjen,**

Salam kenal Bu, baru pertama kali saya ketemu Ibu, semoga pertemuan kita ini membawa berkah ya Bu ya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Yang pertama untuk Dirjen Laut Pak. Saya apresiasi tetapi saya menyarankan Pak, keberhasilan ini harus dibarengi dengan pengawasan dan pelayanan Pak, karena banyak juga saya dengar terjadi *over capacity* dalam bongkar muat di pelabuhan, karena kalau sudah terjadi *over capacity* Pak, banyak akibat yang ditimbulkan, tidak saja biaya tambat labuh, tetapi juga terhadap barang-barang konsumen yang ada di kapal itu barangkali bisa berubah kualitasnya yang menjadi tanggung jawab orang kapal atau EMKL yang melakukan pengurusan bongkar muat itu. Itu saran saja untuk di pelabuhan laut, artinya pengawasan dan pelayanan di pelabuhan itu saja.

Kemudian untuk Ibu Dirjen, Ibu Dirjen Udara. Jadi, kalau setiap rapat Bu kita selalu membicarakan tentang pembangunan pembangunan-pembangunan bandar udara yang baru, tetapi kalau saya tidak saya lebih kepada optimalisasi Bu. Optimalisasi Bandar Udara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang dulunya itu Bu itu *rutenya* Ketapang itu ada ke Semarang, ada ke Yogya, ada ke Kalimantan Selatan, ada ke Surabaya. Kalau sekarang tinggal ke Pontianak. Dulu ke Jakarta langsung pun ada Bu. Artinya prospeknya itu sangat menjanjikan, tapi kenapa sekarang *rute-rute* itu hilang *gitu* tidak ada lagi, termasuk yang langsung ke Jakarta?

Kemudian yang ingin saya ingatkan terus Bu dalam setiap rapat itu masalah optimalisasi terminal. Terminal penumpangnya yang menurut saya sudah sangat harus dioptimalisasi, direnovasi, diperbaiki, *Insyah Allah* semoga ini menjadi dorongan untuk penambahan pendapatan di Kementerian Perhubungan agar semakin meningkat. Jadi, tolong itu diprioritaskan Bu, termasuk *runway* Bu. *Runway* itu sudah sangat tidak memenuhi syarat, walaupun memang boeing belum turun di sana Bu, baru ATR saja yang turun di sana. Saya pikir itu Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dari anggota semua selesai. Sekarang dari unsur pimpinan, saya persilakan Pak Ridwan.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) - WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Pimpinan Rapat.

**Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Roberth Rouw,
Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Anggota yang terhormat,
Pak Dirjen dan Bu Dirjen, tentu dengan seluruh jajarannya,**

Yang pertama, mungkin dengan Bu Dirjen dulu ini. Karena Bu Dirjen ini saya lihat ini cukup energik saya lihat orangnya. Tanggal 27 yang lalu itu di Sulawesi Utara kalau saya tidak salah, Manado itu tidak bisa didarati pesawat itu karena hujan. Pada saat hujan itu bandaranya juga banjir, karena banjir sehingga pesawat juga tidak bisa mendarat. Maksud saya adalah ini mesti diamati seluruh bandara di seluruh Indonesia ini, jangan hujan sedikit bandara sudah banjir duluan yang mengakibatkan penerbangan itu adalah tidak bisa mendarat, gagal mendarat. Jadi, Bu Dirjen menjadi tugas baru ini seluruh bandara harus diperhatikan ini, jangan hujan kecil terus sudah sudah banyak sudah sudah apa namanya banjir duluan yang mengakibatkan pesawat tidak bisa mendarat. Bukan main pesawat itu akhirnya minggir ke mendarat ke apa ke Ternate, kemudian ke Makassar, kemudian ke Gorontalo, itu gara-gara itu, tapi ya namun kita percaya bahwa itu memang musim apa namanya lagi apakah namanya cuaca ekstrem ya, tapi bandara itu seharusnya seberat apapun cuaca ekstremnya harusnya tidak boleh terjadi apa namanya banjir yang begitu lama.

Yang kedua, di Dapil saya itu Pak-Bu Dirjen ada bandara yang dibangun oleh pemerintah daerah namanya di Kolaka Utara. Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Itu dulu Penloknya sudah ada. Penlok-nya sudah ada yang ditetapkan oleh oleh Kementerian Perhubungan, tidak terlanjut dalam Penlok itu dituliskan bahwa 5 tahun harus dibiayai oleh pemerintah daerah, di sisi lain keuangan pemerintah daerah kan sangat pasti sangat minim lah. *nah*, kalau memang itu layak dibangun karena di sana juga ada tambang apa segala di sana banyak ya tambang nikel yang ada di sana dan hubungan transportasi antara bandara yang ada yang terdekat yaitu Kolaka dengan Kolaka Utara itu sangat jalan sangat susah, berat jalannya ya, berat sekali jalannya di sana sampai 8 jam perjalanan. Oleh karena itu mungkin itu juga bisa menjadi perhatian dari Bu Dirjen apakah bisa sudah bisa dipikirkan sama dianggarkan tahun 2024 atau belum, tapi saya berharap itu segera bisa menjadi pikiran Bu Dirjen, termasuk juga Bandara Haluoleo yang Kendari ya Kendari, itu juga sudah saya kirim sama Bu Dirjen itu data-datanya barangkali Bu Dirjen bisa menjadi perhatian. Terima kasih Bu Dirjen, Bu Dirjen Udara.

Pak Dirjen, Pak Toha

Terima kasih, banyak hal yang Pak Toha sudah melahirkan apa namanya termasuk PNBPN yang begitu tinggi ya, tapi bahwa kita boleh jujur salah satu yang terbesar juga adalah masih banyak PNBPN itu yang liar-liar, yang tidak bisa didapati. Mungkin Bapak perlu, apa namanya merancang satu membentuk satu tim untuk mengevaluasi semua. Kalau pelabuhan-pelabuhan kita yang selama ini yang kadang-kadang menjadi permainan para apa namanya itu para penambang-penambang, kita tahu para yang pemakai kapal-kapal kita yang ada yang pada akhirnya kadangkala PNBPN juga menjadi menghilang.

Yang berikutnya adalah ini ada *rute, rute* Kendari-Wakatobi-Ereke. Kendari-Ereke-Wakatobi, Kendari, Ereke, Wakatobi Sulawesi Tenggara Pak. Ini ada jetliner namanya jetliner ya di sana, padahal di sana itu Pak, sudah ada sebenarnya swasta yang melayani. *Nah*, pertanyaan saya memang kan disubsidi Pak. Seandainya misalkan yang jetliner itu apa diperuntukkan kalau saya tidak salah adalah terhadap hal-hal yang tidak dilalui, yang tidak ada apa namanya yang tidak ada kapal sebagai moda transportasi di situ, tapi ini kok tumpang tindih, kasihan sudah ada pengusaha yang ada di situ, terus jetliner juga lewat di situ, yang pada akhirnya tentu pasti kalah bersaing karena jetliner kan pasti dapat subsidi, tapi saya tidak mengerti aturannya, mungkin Pak Dirjen bisa menjadi perhatian saja ini dicermati kalau memang bahwa ini adalah ada menyalahi ya segera dihentikan, tapi kalau tidak menyalahi ya *ndak* apa-apa. Itu kira-kira Pak Dirjen.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya.
Pimpinan, Pak Lasarus silakan.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik. Terima kasih.

**Pak Roberth, Pimpinan Rapat, Pak Ridwan,
Teman-teman Anggota Komisi V,
Pak Dirjen, Bu Dirjen Udara, Dirjen Laut dan seluruh jajaran yang saya hormati,**

Rapat ini diikuti juga dari *online* dari masing-masing KSOP ikut *nggak* ini Pak? Ikut ya? Baik. Ya saya berharap seluruh Kepala Bandara juga mungkin monitor ya apa yang kita bicarakan hari ini.

Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hamka tadi, barangkali Pak Dirjen Laut nanti kita rapat khusus ya Pak, ya, rapat khusus nanti kita

bicarakan. Sebenarnya ini pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu Pak. Mungkin nanti saran saya kalau memang tuntas di rapat khusus membahas soal ini ya, tol laut kemudian soal subsidi, soal Tersus dan segala macam memang banyak laporan sampai di komisi ini Pak, ya kita *nggak* usah bentuk Panja lah, kita cukup sampai di situ saja. Mungkin nanti Pak Dirjen gambarkan kepada kami *gitu loh* peta wilayahnya seperti apa, karena teman-teman ini kan seperti daerah yang banyak bauksit di tempat saya, kemudian batubara Kaltim ada juga Dapil-nya sini Pak Iwan ya, kemudian kalau bauksit di sini ada Pak Ridwan, ada teman-teman dari Sulawesi. Jadi, kasat mata di lapangan sebenarnya teman-teman ini tahu semua Pak, ya, petanya seperti apa tahu semuanya. Mungkin nanti kita satukan pandangan di sini.

Saya sih berharap pimpinan dan seluruh anggota ini selesai di rapat khusus saja *gitu loh*, karena kalau bentuk Panja kita akan mengurus energi lagi di ujung-ujung menjelang 2024 ini pasti menyita banyak waktu. Oleh karenanya perlu kerjasamanya Pak Dirjen, nanti teman-teman dari laut ya.

Kita apresiasi Pak PNBP dari laut ini dari tahun ke tahun terus meningkat, kita apresiasi. Kinerja yang luar biasa dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun Udara ya peningkatan PNBP-nya dari tahun ke tahun itu luar biasa dan tingkat capaiannya juga, bahkan tahun lalu kalau saya tidak salah melebihi 100% kita apresiasi. Oleh karenanya itu menggambarkan bahwa potensi PNBP itu masih besar di laut yang belum kita garap.

Nah, saya seringkali diskusi dengan Pak Dirjen juga kita sering diskusi Pak Dirjen ya terkait hal ini ya, mungkin potensi-potensi yang ada itu kita perlu matangkan kembali ya untuk kiranya bisa kita rapikan secara sebaik mungkin. Kami mendorong Pak, memang di laut itu kontestasi itu menurut kami penting Pak Dirjen ya, jangan sampai ada faktor monopoli misalnya dari BUMN itu juga harus kita lihat sejauh mana hubungannya dengan potensi PNBP Bapak diomel-omel di sini, dibilang kerja tidak maksimal dan seterusnya, padahal Bapak sudah berusaha setengah mati. Kalau masih ada *bottleneck* yang Bapak hadapi di lapangan, Pak Dirjen bicara sama kita ya sampaikan ke kami Pak. Kalau di sini kita *nggak* ada urusan. Kami melaksanakan undang-undang ya, kita diperintahkan itu oleh negara dan saya, Pak Ridwan, Pak Roberth dan kami semua di sini digaji oleh negara Pak, melaksanakan tugas dan fungsi ini dan wajib hukumnya kita bekerjasama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal baik Laut maupun Udara. Bapak sudah kerja setengah mati, tapi saya tahu Pak, seperti di laut tantangannya tidak mudah. Itu Bapak berhadapan dengan banyak sekali kepentingan ya, bahkan mungkin di luar kemampuan dari seorang Pak Toha mungkin sebagai Dirjen Laut. Saya tahu Pak, yang *gitu-gitu* bareng-bareng Pak, kita menghadapi. Kalau kita keroyokan lama-lama kabur juga dia Pak, percaya sama saya.

Kalau kami-kami ini Pak, kalau sudah maju gigi mundurnya hilang Pak, biasanya. *Nah*, kalau sudah memutuskan maju, gigi mundur kita *ndak* ada. Segala risiko kita hadapi. Kita bantu teman-teman di laut, tapi teman-teman di laut mesti terbuka Pak, sama kita, ini petanya bagaimana *gitu loh* supaya tidak berpraduga terus.

Nah, ini kan Pak Hamka ini tidak pernah bicara sektor ini setahu saya Pak, dan ilmu Pak Hamka soal ini kayaknya mesti kuliah perlu 2 SKS lagi ya Pak, ya? Jadi baca-baca aturan ini Pak Hamka tadi masih tanya-tanya. *Nah*, nanti kalau saya buka lebar-lebar ke Pak Hamka, Pak, yakin saya, dia lebih pintar dari saya lama-lama Pak, soal ini. *Nah*, ini kan nanti capek kita berdebat di sini. Oleh karenanya Pak Dirjen mungkin di rapat khusus nanti siapkan bahan sebaik mungkin Pak, Tersus kita ada berapa, kemudian pelabuhan resmi ada berapa, Bapak sampaikan juga ada berapa perusahaan yang menjadi *supporting* di wilayah itu (suara kurang jelas) ya, atau ada STS ada berapa banyak dan seterusnya, ini kita petakan semua Pak. Kita juga tidak ingin Pak, ada monopoli yang menghambat *gitu loh*. Kadang-kadang Pak, monopoli ini ada tidak baiknya, tidak ada kompetisi yang pada akhirnya mengakibatkan itu tadi Bapak berhadapan dengan banyak orang yang dibangun oleh sistem monopoli itu yang pada akhirnya Bapak *nggak* kuat menghadapinya.

Ini saya ngomong ini bukan tanpa data Pak, ya. Jadi, saya tidak kepingin ini sampai di Panja, apalagi Pansus, cukup kita selesaikan di rapat, tapi Bapak buka kepada kita ini loh petanya, ini potensinya, ini yang belum tergarap, ini sudah tergarap, selesai.

Nah, kalau kita bicara tol laut Pak, tol laut ini kita sama-sama tahu nih, kita tidak terlalu sukses. Saya menggunakan bahasa itulah. Tol laut kita tidak terlalu sukses. Saya tidak ingin menggunakan bahasa lain karena saya partai pemerintah Pak, tidak boleh menggunakan kata lain. Pak Ridwan ketawa ini ya, tidak terlalu sukses. Oleh karenanya kita juga sampaikan Pak, apa kendalanya sehingga kita tidak terlalu sukses untuk tol laut ini.

Ya kalau Dirjen Udara, saya pikir Ibu tugasnya Bu Dirjen Udara ini memang tinggal menyelesaikan ini saya lihat ya. Pak Jokowi sudah menyampaikan kepada kita semua Bu ya, bahwa untuk proyek strategis itu harus sudah selesai 2024. Jadi, fokuslah untuk menyelesaikan seluruh bandara-bandara yang memang kita kerjakan sampai 2024 ya. Di luar daripada itu takutnya nanti apa tidak dilanjutkan oleh yang berikutnya kan jadi masalah nanti ya. saya pikir kemudian rencana induk pelabuhan udara kan pasti ada.

Nah, kita mau bangun bangun bangun, tiba-tiba Boy tadi bilang Ketapang itu sudah kehilangan banyak *rute*, kenapa bisa begitu? Ya kan kita cari sebabnya ini. Kita bangun buang banyak duit, tapi tidak dimanfaatkan.

Di Pulau Jawa ini Bu semenjak tol ini jadi, berubah ini Bu irama ini, berubah. Teman saya bilang "Pak Lasarus, saya kalau mau ke Surabaya dari Solo harus ke Jakarta dulu, terbang ke Jakarta dulu, baru terbang ke Surabaya", *nggak* ada penerbangan Surabaya ke Solo, Solo-Surabaya. Berubah nih pola pola masyarakat jadi berubah, itu berakibat kepada mubazirnya Pak, begitu banyak bandara yang kita bangun. Belum nanti kita bicara kereta cepat Bu, Jakarta-Bandung, Bandung ke Surabaya itu pasti merubah irama lagi. *Nah*, hal-hal seperti ini saya pikir harus diantisipasi dari awal oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Saya rasa itu saja dulu kali Pak Pimpinan ya, atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, semua selesai.

Saya dari pimpinan rapat ya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kepada Dirjen Perhubungan Laut karena kemarin kunjungan spesifik saya mimpin kita kunjungan kerja ya ke Maluku, ada peninjauan ke Pelabuhan Laut Tulehu, ini yang pertama mereka kita lihat di sana bahwa perlu dibangun atau ditata kembali pedagang kaki lima yang membuka aktivitas dagang di sana sehingga itu tidak mengganggu proses bongkar muat penumpang maupun barang di pelabuhan itu. Yang kedua, Gedung Kantor Pelabuhan Laut Tulehu perlu dilakukan rehabilitasi sebab aktivitas pelayanan saat ini sudah tidak lagi maksimal untuk melayani masyarakat karena sempit dengan total kebutuhan anggaran sebesar 500 juta. Ini untuk kementerian untuk Dirjen Laut.

Yang berikut ini saya ingin sampaikan sekali lagi Pak Dirjen, ini aspirasi yang datang dari teman dari Dumai masalah izin pelimpahan izin panduan ya penundaan kapal di sana. Saya kira saya sudah pernah kasih proposalnya Pak Dirjen, mohon ini jangan kita setiap kali kita tanya terus mohon ada jawaban yang baik karena tadi sudah disampaikan sama teman bahwa jangan sampai ada monopoli, semua itu dia pengelola, dia yang semua dia ya kan. Jadi, agar ini pemerintah daerah sudah sanggup untuk juga melakukan itu, maka saya kira ini perlu juga diberikan kepada pemerintah daerah.

Yang berikut Dirjen Udara, ini ada usulan kami nanti kami akan serahkan proposal ini kemarin kami usulkan untuk di 2023, tetapi karena memang ada beberapa syarat yang belum dan itu semua sudah dilengkapi dan nanti kami akan berikan secara ini kepada Ibu yaitu pembangunan lapangan terbang Hilariki di Distrik Ubalih ya, ini di kabupatennya Yahukimo, *nah*, itu proposalnya sudah lengkap, tanahnya semua sudah diselesaikan semua ya.

Yang berikut saya melihat RKA kita ini pun karena waktu itu saya sudah usulkan melalui Pak Menteri dan ada di 2023, tetapi yang tadinya 9 miliar itu pekerjaan pelapisan *runway* sampai dengan aspal hotmix termasuk *marking* dan pengawasan itu senilai 9, tapi sekarang sudah turun menjadi 5 dan menjadi catatan saya yaitu bahwa nama di RKA soal bandara ini masih tertulis Sudjarwo Tjondronegoro, padahal bandara ini sudah ditutup, sekarang sudah pindah ke yang namanya Stevanus Rumbewas itu beda ya. Jadi, sekarang ini sudah tidak ada penerbangan lagi di Sudjarwo Tjondronegoro ini sudah ditutup itu sudah tidak lagi melayani ya. Jadi, mohon ini dan saya minta supaya kalau bisa ya dibikinlah *multiyears gitu* supaya ini bisa selesai semua, karena catatan Bu Dirjen, saya itu sudah takut juga pulang *gitu* karena mendarat itu ngeri sekali saya. Saya tanya pilot waduh ini sangat berbahaya karena aspalnya sudah terkelupas semua ya. Jadi, ini yang menjadi catatan.

Dan, berikut tadi saya juga sudah sampaikan Ibu Dirjen masalah eh kelanjutan dari pembangunan ya bandara di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak Ilaga ya itu terhenti ya dari tahun 2020 ya, sejak Covid itu sudah terhenti ya, padahal itu tinggal sedikit lagi saya kira itu sudah selesai. Ini semua data-datanya nanti saya akan berikan kepada Ibu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan.

Selanjutnya karena semua sudah selesai, dari pimpinan pun sudah selesai, maka saya berikan kesempatan kepada para Dirjen untuk menyampaikan tanggapan yang singkat-singkat saja ya nanti yang secara ini lengkap saya mohon secara tertulis ya, singkat saja. Saya silakan mulai dari Pak Dirjen Laut.

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. ARIF TOHA TJAHHAGAMA, DEA):

Bismillahirrahmanirrahim,

Terima kasih yang kami hormati Pimpinan Komisi V DPR RI, Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI. Atas pertanyaan tanggapan dan masukan yang diberikan pada kami dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kegiatan Tahun 2023.

Yang pertama, Bapak, kami akan sampaikan jawaban dari pertanyaannya Bapak, adanya perbedaan alokasi dan Pagu sebesar 215 miliar tadi, itu adalah sesuai dengan adanya komposisi alokasi Pak, di internal kami antar Eselon I sesuai surat Bapak Menteri Perhubungan tanggal 19 September bahwa ada penambahan untuk Dirjen Darat dan Perkeretaapian, sehingga kami di Laut dan Udara dilakukan rekomposisi sedangkan kami mendapatkan pengurangan sebesar 215 miliar untuk Dirjen Darat dan Perkeretaapian dan ini sudah disampaikan Pak Menteri Perhubungan kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak, dengan surat tanggal 19 September, karena kebutuhan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk memenuhi aspirasi, Bapak.

Menanggapi beberapa pertanyaan terkait dengan capaian kinerja kami dan rencana 2023, secara garis besar kami sampaikan bahwa memang PNBPN akan kami tingkatkan Pak, sesuai dengan potensi-potensi yang ada, termasuk tadi mengenai Tersus dan TUKS menjadi perhatian kami untuk terus dilakukan penertiban dan penerbitan perizinan dan pengoperasiannya sehingga dapat meningkatkan PNBPN kami di 2023, 2023 ini yang ditargetkan mencapai lebih tinggi daripada 2022 yang lalu. Beberapa capaian untuk keterhubungan dan pelabuhan utama ini memang sesuai target 2024 adalah untuk pelabuhan utama ada 7 lokasi, sedangkan 2022 baru tercapai 4 lokasi. Jadi, sesuai target 2022 memang hanya 4 lokasi, nanti sampai 2024 akan kami capai jadi 7 lokasi. Terkait dengan keterhubungan, memang di targetnya 2024 itu adalah 27%, Pak, jadi kami sudah mencapai target di 2022. Sementara yang lainnya akan diupayakan di periode-periode RPJMN berikutnya.

Terkait beberapa masukan daya serap yang belum optimal tersisa 2,5% memang ada beberapa kendala Bapak, jadi ada kemarin ada lelang yang

terlambat sehingga hanya bisa dibayarkan uang mukanya saja, sedangkan termin pertama tidak bisa dibayarkan, juga ada beberapa sisa-sisa anggaran yang memang tidak bisa direalokasi, jadi seperti SBSN dan PHLN yang merupakan sisa kontrak itu tidak bisa dialihkan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan lain.

Kemudian terkait dengan Tanjung Carat, memang saat ini sedang berproses, Pak, jadi kami sedang proses untuk Amdal-nya di KLHK dan KKP untuk kemudian juga penyiapan RIP dan DED-nya secara paralel, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan semua dokumen dapat dilengkapi dengan baik.

Terkait dengan adanya PNBP liar, nanti kami akan sampaikan pada saat rapat tentang Tersus TUKS, Bapak, jadi kami akan siapkan bahan sebaik mungkin untuk, memang jadi perhatian juga Pak Menteri dan kami akan upayakan pengawasan yang lebih ketat lagi untuk Tersus TUKS sesuai perizinan dan operasional yang mereka lakukan karena memang lokasinya sangat tersebar, sehingga ini perlu perlakuan khusus terkait dengan pengawasannya. Kami sudah menerbitkan beberapa peraturan untuk bisa mengawasi kegiatan Tersus dan TUKS yang sangat tersebar di beberapa, ada tambang terutama.

Saya pikir itu yang beberapa hal yang dapat kami sampaikan Bapak sebagai jawaban ringkas kami. Selanjutnya, akan kami sampaikan secara tertulis dengan data-data dukung yang lebih lengkap lagi. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas tanggapan, dukungan kami, dukungan dari Komisi V kepada Dirjen Perhubungan Laut.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Lanjut, Ibu Dirjen Perhubungan Udara, silakan.

**DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(MARIA KRISTI ENDAH MURNI, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Bapak Ketua yang terhormat, Bapak Wakil Ketua, Ibu-Bapak Anggota Komisi DPR RI yang kami hormati, atas masukan aspirasi dan Ibu-Bapak sekalian.

Sebagaimana tadi disebutkan oleh kawan Laut saya, bahwa Pagu Anggaran 2023 Ditjen Perhubungan Udara memang berkurang 185 miliar karena akibat rekomposisi pemenuhan prioritas di kementerian internal kami.

Mengenai tadi ditanyakan oleh beberapa, kami catat ada pertanyaan untuk terkait kerugian ganti rugi Sriwijaya, dapat kami sampaikan bahwa

dokumen *release and discharge* atau R&D, itu tidak membatasi atau tidak menghilangkan hak korban untuk menuntut ke pihak lain. Terbukti memang ada contoh kasus di kasus Lion, bahwa pihak ahli waris korban bisa melakukan tuntutan hukum kepada Boeing dengan objek yang berbeda dan walaupun sudah menandatangani R&D dan mendapatkan ganti rugi. Untuk hal tersebut, memang kami harus lebih memberikan sosialisasi kepada ahli waris dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman, untuk ini kami akan segera memanggil pihak, pihak-pihak yang berkepentingan untuk kami berikan atau kami pertemukan agar tidak menjadi kesalahpahaman.

Kemudian, untuk terkait aksesibilitas akreditasi bandara-bandara yang ada maupun yang akan selesai, kami akan terus-menerus melakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*, kementerian, dan lembaga terkait, Pemda, dan juga kepada operator untuk penyiapan armada, karena memang di beberapa tempat ada pengurangan-pengurangan *route* selain pengurangan frekuensi, selain karena memang, armada memang belum kembali kepada posisi 2019 dan memang *demand*-nya juga masih belum terlalu tinggi masih domestik masih 70% dan internasional masih 30% untuk *recovery rate*-nya.

Kemudian, untuk keterlambatan atau *delay* atau secara umum pelayanan, kami akan terus-menerus melakukan pengawasan kepada semua bandara yang dibantu oleh (*suara kurang jelas*) dan Inspektur Penerbangan di pusat maupun di kantor otoritas bandara yang merupakan kepanjangan tangan kami dari pusat. Kemudian, kami juga akan mem-*breakdown* faktor penyebab *delay* agar di kemudian hari tidak terjadi lagi.

Terkait dengan pembangunan, pengembangan, maupun perbaikan infrastruktur di bandara, tentu ini menjadi nafas dan perhatian kami karena terkait dengan *safety*, kami akan segera koordinasikan. Sekiranya untuk yang pertanyaan lain akan kami, detailnya akan kami sampaikan secara tertulis dengan data yang lebih lengkap, demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, kita demikianlah Saudara-Saudara apabila tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita bahas, maka sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Pasal 283, kita akan merumuskan kesimpulan atau keputusan RDP pada hari ini untuk kita sepakati dan kita tandatangani. Kesimpulan, baik saya bacakan ya.

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Selasa, 31 Januari 2023.

1. Terkait Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dalam APBN Tahun Anggaran 2022:
 - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

No	Unit Organisasi Eselon I	Realisasi Keuangan TA 2022	Realisasi Fisik TA 2022
1.	Ditjen Perhubungan Laut	97,38%	99,08%
2.	Ditjen Perhubungan Udara	97,29%	98,84%

- b. Terhadap program atau kegiatan di Tahun Anggaran 2022 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program atau kegiatan Tahun Anggaran 2022, sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan saran, masukan, serta usulan Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk:
 - a. Mengedepankan perencanaan yang komprehensif dalam pembangunan pelabuhan dan bandara;
 - b. Memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak;
 - c. Meningkatkan pengawasan terkait dengan ketetapan waktu dan fluktuasi harga tiket pada transportasi udara.
4. Komisi V DPR RI meminta Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara, ini Dirjen *dong*, tambah Dirjen-nya itu. Kami ulang, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terhadap subsidi angkutan yang melayani pada jalur perintis dan menyampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR RI pada RDP yang akan datang.
5. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk mengambil langkah konkret dalam mempercepat penyelesaian pembayaran ganti kerugian atas kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
6. Terhadap perubahan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dalam APBN Tahun 2023, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan agar melaporkan perubahannya kepada Komisi V DPR RI untuk mendapatkan persetujuannya kembali.

Ini yang tadi ya, jadi jangan setelah kita rapat baru dilaporkan, kalau bisa itu sebelumnya ya, Bapak ada perubahan langsung dibuatkan surat resmi kepada kita itu yang kami.

Baik, saya kira enam poin ini yang dapat kami.

F-PAN (H.A. BAKRI H. M., S.E.):

Ketua interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan ada usulan. Oh ini datang langsung usulan, silakan.

F-PAN (H.A. BAKRI H. M., S.E.):

Ya, izin Pak Ketua. Sebenarnya tadi saya dari dari jalan dari bandara sudah mengikuti rapat.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PAN (H.A. BAKRI H. M., S.E.):

Cuma *nggak* bisa masuk-masuk *anunya* sinyalnya bergerak-gerak terus. Ini kebetulan baru sampai.

KETUA RAPAT:

Masalah ini ya?

F-PAN (H.A. BAKRI H. M., S.E.):

Iya, masalah ini masalah semuanya mungkin.

**Pak Pimpinan yang saya hormati,
Pak Dirjen, Bu Dirjen,**

Ini khusus ke Pak Toha ini Pak Toha, jadi di Jambi itu ada satu pelabuhan Pak, Ujung Jabung ini sudah hampir dua tahun puasa ini, Pak, saya tidak pernah cerita tentang Pelabuhan Ujung Jabung. *Nah*, cuma ada yang tidak enaknyanya Pak, seakan-akan Pelabuhan Ujung Jabung itu seperti mangkrak, padahal sudah menelan anggaran ratusan miliar. *Nah*, ya saya sedikit agak miris Pak, Pak Dirjen karena letaknya di lepas laut Pak, jadi lama-kelamaan nanti apa yang dibangun itu bisa-bisa hancur habis semua *gitu*, termasuk juga trase yang menuju ke tengah itu. Jadi, minta tolong, kemarin memang dikarenakan ingin dicarikan investor, kalau *toh* memang mau dicarikan investor mohon bisa secepatnya, jangan sampai nanti apa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah yang ratusan miliar itu jadi rata nanti Pak.

Kalau *toh* memang masih menunggu itu juga mungkin ada langkah-langkah sendiri dari kementerian dalam rangka menjaga aset-aset yang sudah ada itu Pak, jangan dibiarkan Pak, satu persatu itu lama-lama habis semua Pak, tiangnya saya lihat saya pernah ke sana sudah *nggak* lurus lagi sudah mulai miring *gitu*, temboknya sudah mulai pada. *Nah*, ini kelamaan-kelamaan nanti habis. Jadi, saya mohon mungkin melalui tangan dingin Pak Toha mungkin bisa ada langkah-langkah yang baik.

Terus yang kedua, Bu Kristin, di Jambi itu ada Bandara Kerinci saya dengar juga *alhamdulillah* tahun ini ada anggaran walaupun dilaksanakan secara *multiyears*, cuma saya ingin bagaimana tahun 2024 nanti mudah-mudahan bandara itu bisa selesai Bu, karena ini juga merupakan satu destinasi wisata yang Pak Menteri pun, Pak Budi Karya Sumadi pun juga pernah ke sana menjanjikan akan menyelesaikan. Memang ada konflik tanah, tapi saya pikir tidak perlu terlalu dibesar-besarkan, tapi daerah yang mau dibangun itu sebenarnya sudah dibebaskan sebagian. Jadi, itu saja mungkin Pak Ketua yang baik hati.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik. Ya, Pak Hamka tanggapannya?

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Ya, kaitannya kesimpulan, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Kesimpulan Nomor 6 itu dijadikan Nomor 2, karena terkait pada anggaran.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Di balik ya, jangan nomor terakhir itu.

KETUA RAPAT:

Itu harus di atas betul.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Terima kasih.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Saya izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tanggapan lagi soal ini? Ya silakan.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Yang

KETUA RAPAT:

Poin berapa?

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Poinnya sudah agak-agak naik, naik, turun, dua kalau *nggak* salah ya itu tadi, empat.

KETUA RAPAT:

Empat.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Empat yang evaluasi tadi *loh*, mana tadi? *Nah*, ini, lima, poin lima Pimpinan. Di dalam kita Raker dengan Menteri, yang kemarin, kan juga ada evaluasi terhadap perintis ya, Pak, ya, baik bandara maupun itu. *Nah*, maksud saya itu tidak hanya evaluasinya terhadap subsidinya, tetapi kalimatnya kementerian, Komisi V dan seterusnya untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap bandara perintis ya dan subsidi angkutan yang melayani pada jalur perintis.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Bandara, ininya juga ada subsidi ya Pak, yang laut itu ya.

KETUA RAPAT:

Itu pelabuhan, kalau

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Pelabuhannya ada juga ya.

KETUA RAPAT:

Ini bandara itu sudah itu sudah masuk itu.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Ya maksudnya bandara dan dan dan pelabuhan kan?

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Ya, maksud saya melakukan evaluasi dan tidak lanjut terhadap terhadap bandarannya itu sendiri juga maupun pelabuhannya, kan bandarannya kemarin bandara perintis itu kan bermacam-macam, ada yang mangkrak, ada yang *nggak* bagus dan seterusnya, itu maksud saya yang harus dievaluasi dan ini tadi kan terkait juga dengan subsidiya. Jadi, ada dua poin itu.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Terima kasih.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sudah? Baik. Jadi, yang ke lima ya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Izin.

KETUA RAPAT:

Pak Hamka?

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Iya. Saya kira apa yang disampaikan tadi yang ingin saya pertegas di poin lima ini adalah sebenarnya intinya adalah satu tol laut, yang kedua terhadap kaitannya dengan Tersus-Tersus, tadi. Ini belum mengena pada poin lima sebenarnya. Kalau secara umum apa yang disampaikan evaluasi dan tindak lanjut itu boleh-boleh saja satu poin ya, tetapi yang kami persoalkan khusus di sini ada dua poin yang harus dirapatkan secara khusus, walaupun nanti terkait juga nanti pada subsidi yaitu subsidi tol laut dan udara di sektor udara dan sebagainya, dan terkait juga dengan Tersus-Tersus tadi supaya diperjelas di situ. Tolong dirumuskan dulu.

KETUA RAPAT:

Pak Hamka? Ya, saya kira Pak Hamka ini kita nanti kan kita akan rapat khusus masalah itu *toh*? Ya, nanti ya? Dalam ya, RDP nanti kan?

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Dalam RDP nanti?

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Itu evaluasi dan tindak lanjut itu bukan terhadap subsidinya, tetapi terhadap itunya subsidinya sendiri seperti yang disampaikan Pak Hamka tadi ada dua poin sendiri.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya?

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Itu kalau kita melihat sebenarnya dalam rangka menunjang pelayanan itu, itu sebenarnya itu subsidi itu ada dua, ada subsidi disasarkan pada subsidi tol laut dan juga tol udara. Sebenarnya itu ada dua poin. Jadi, apakah dipenggal digabungkan jadi satu atau dipisahkan? Itu adalah memang itu instruksi presiden yang telah diterjemahkan oleh Kementerian Perhubungan.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Kalimatnya yang "a" itu melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelayanan pada, atau pemanfaatan pada bandara dan pelabuhan titik perintis ya maksudnya pelabuhan perintis ya, Pak, ya. Ya, kemudian subsidiya di bawahnya "b" ada sendiri. Berikutnya yang itu, *nah*, evaluasi terhadap subsidi angkutan yang melayani pada jalur perintis termasuk bandara dan pelabuhan.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Digabung saja, Mbak, itu "b" poin "b" dengan "b" yang lama terminal khusus itu digabung saja jadi satu. Evaluasi terminal khusus, jadi evaluasi terhadap subsidi angkutan terminal khusus yang melayani jalur perintis.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, evaluasi terhadap. Ya, oke ya?

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Pimpinan, sedikit lagi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Ini, Pimpinan, ini perlu dipertimbangkan ya, artinya kalau kita melihat, membaca, sekaligus mengikuti setiap RDP ataupun apapun jenisnya dengan mitra kerja kita, keputusannya hasilnya kurang lebih sama semua. Mau redaksinya mau substansinya kurang lebih pergantian angka. Sementara, dampak daripada keputusan itu, itu kecil sekali *gitu*, terutama yang berhubungan dengan misalkan komitmen-komitmen tentang ke-Dapil-an kita.

Nah, perlukah kita masukkan *gitu*, tapi sifatnya umum saja agar apa yang kita hasilkan ini dipublikasikan ke bawah, dijelaskan *gitu*, sehingga kita ada selama ini kan modelnya begini *ngambang* semua.

KETUA RAPAT:

Oke.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Gitu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Misalnya?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Saya menambahkan, Pimpinan. Saya kira selama ini kita normatif-normatif saja kan. Kita memang melakukan fungsi pengawasan dan *budgeting*. Ada satu hal yang kita lupakan Pimpinan, saya tidak melanjutkan dulu ini Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Ya, terima kasih. Saya tadinya mau (*suara kurang jelas*) ini terus kan. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Ketua, saya pikir ya mau (*suara kurang jelas*), ini terus dari tadi saya Pak, tapi Pak Fauzi, Pak Hamka bilang untuk apa, maksudnya begini sejauh ini kita rapat-rapat terus dengan mitra kerja ini, ada Undang-Undang MD3 yang mewajibkan kita dalam hal penyusunan program Pak, pembangunan di wilayah Dapil karena kita terpilih ini berkat mereka. *Nah*, beberapa hal yang digambarkan tempo hari dan sudah melalui apa namanya ini tidak jalan nampaknya *gitu loh*. Saya kira Pimpinan juga harus pertegas ini, barangkali di dalam kesimpulan-kesimpulan kalau atau bila dianggap penting ya masukkan saja kaitannya dengan komitmen-komitmen pembangunan di Dapil itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya. saya kira apa yang disampaikan ini, semua semangat kita untuk menjalankan amanat undang-undang yang telah ada, ya, maka saya selaku mimpin, saya ingin para Anggota, ya, saya buka selebar-lebarnya bahwa ini bukan keputusan ketua, tapi kita semua secara kolektif *gitu*. Jadi, apa yang perlu disampaikan oleh teman-teman pada mitra yang memang menjadi

keputusan kita pada saat ini ya silakan, *gitu*. Saya tidak akan juga memaksakan ini harus kita dengan bahasa-bahasa yang ini, kalau memang teman-teman Anggota semua bersepakat keputusan kita harus seperti apa ya mari kita lakukan itu *gitu* ya kan, tapi saya cuma ingatkan bahwa kita tadi masalah yang tadi Pak Hamka sampaikan, kita sudah ada di sana bahwa kita minta nanti ada RDP khusus untuk itu, untuk pendalaman nanti lebih khusus lagi, makanya kita minta para Dirjen, ini menyiapkan itu untuk bisa nanti di dalam RDP khusus kita.

Silakan, Pak Sumail, ada lagi?

F-P.GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Ketua, jadi saya tambahkan lagi. Apa yang kita sepakati tempo hari tidak hanya ditulis, tetapi ditindaklanjuti. Saya selaku Kapoksi juga membawa gerbong di belakang dan saya harus pertanggungjawabkan juga terhadap Fraksi, seperti itu Ketua dan ini yang menjadi keresahan dan kegelisahan. Saya kira bukan hanya apa yang saya sampaikan hari ini, teman-teman tadi juga bisik-bisik *gimana* ini, *gitu loh* ya. Saya kira begitu, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, oke.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Saya pertegas sedikit barangkali, Pimpinan. Yang diinginkan di sini jangan hanya tinggal sebuah catatan saja dalam kesimpulan, tapi harus *follow up*-i dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab kepada kita semuanya.

Terkait apa yang disampaikan Pak Sumail itu nanti dibahas secara, memang banyak hal yang sudah dijanjikan dan sudah diputuskan dalam rapat-rapat Poksi misalnya itu tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi tidak *usah* kita *ngomongin* di sini hal-hal yang lain nanti disampaikan langsung ke Pak Dirjen dan Ibu Dirjen.

Terima kasih.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Fauzi, tidak lapar kah?

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Sedikit, sedikit lagi. *Nggak*, makanya kalau kita hanya, apa ikuti rutinitas seperti ini, khawatirnya juga ya, begitu-begitu lagi, makanya kalau bisa ada klausul di poin kita tambahan substansinya yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Pak Ketua. Jadi, mudah-mudahan dengan ada klausul baru itu ada poin baru itu ke depan itu komitmennya bisa saling dijaga, ini kan bicara bagaimana kita menjaga ke apa ya kepercayaan, *gitu*.

KETUA RAPAT:

Iya, makanya tadi saya bilang kan, saya saya buka saja, mau bikin isi saja maunya apa *gitu*, ya kan.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Ya substansinya seperti yang tadi kita sampaikan.

KETUA RAPAT:

Oh ya sudah.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Gitu ya, nanti redaksinya biar teman-teman kita kan ada TA ini untuk redaksinya.

KETUA RAPAT:

Sudah, ini saya kira yang ada poin dua itu kan jelas itu, ya kan, untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran ya, ada juga di situ ya. Jadi, saya kira itu. Nanti kita akan bicara bagaimana kita ke depan dengan mitra kita internal nanti itu ya, kita lebih fokus untuk bicara itu ya.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Terus sebenarnya sudah normatif juga ada.

KETUA RAPAT:

Nah, iya, makanya nanti kita internal kita bicara dulu.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Makanya harapan kami pun walaupun ini tidak dimasukkan di dalam kesimpulan rapat, Pak Ketua bisa *mem-follow up*-i itu.

KETUA RAPAT:

Ya, oke.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Oke, ya, Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Ya. Ya, selesai ya Anggota, ya?
Kita tawarkan untuk mitra.
Dari Anggota setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Nah, dari Pemerintah, para Dirjen mohon tanggapan.

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. ARIF TOHA TJAHHJAGAMA, DEA):

Terkait dengan kesimpulan ini kami setuju, Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik.

**Saudara-Saudara,
Saudara-Saudara yang saya hormati,**

Dengan telah disepakati beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut, maka rangkaian acara RDP pada hari ini, telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat ini.

Sebelum rangkaian rapat ini, hari ini kami tutup, kami berikan kesempatan kepada salah satu Dirjen untuk menyampaikan kata penutup, Ibu Dirjen Perhubungan Udara, silakan.

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (MARIA KRISTI ENDAH MURNI, S.H., M.H.):

Terima kasih, Bapak.

Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Terima kasih, kami ucapkan atas semua masukan serta aspirasi Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat. Ada beberapa masukan yang merupakan *highlight* akan kami lebih perhatikan.

Selanjutnya, seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Laut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR dan kami akan senantiasa terbuka untuk kerja sama yang positif dalam pelaksanaan Program Kerja Tahun 2023. Tentu dalam penyampaian tadi kami tentu akan tentu kami banyak kekurangan, untuk itu kami mohon perkenan maaf yang sebesar-besarnya.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Apabila tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu kita bicarakan, maka rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.35 WIB)

JAKARTA, 31 Januari 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002